

**ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI KURIKULUM
MERDEKA DI MA NU MRANGGEN DEMAK**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd.)**



Oleh:

ARIQUL IRFAN YUSAN NABIL

NIM 31502000023

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

JURUSAN TARBIYAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Ariqul Irfan Yusan Nabil

NIM : 31502000023

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jurusan : Tarbiyah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Analisis Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen Demak”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Sumber informasi yang berasal dari penulis lain telah disebutkan dalam sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Semarang, 7 Mei 2024

Saya yang menyatakan,



Ariqul Irfan Yusan Nabil

NIM. 31502000023

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 14 Mei 2024

Perihal : Pengajuan Ujian Munaqosyah Skripsi

Lampiran : 2 (dua) eksemplar

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa:

Nama : Ariqul Irfan Yusan Nabil

NIM : 3150200023

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Jurusan : Tarbiyah

Fakultas : Agama Islam

Judul : Analisis Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen Demak

dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sjana Pendidikan (S.Pd.)

Demikian, atas perhatian bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

NIDN. 0623126401

PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **ARIQUL IRFAN YUSAN NABIL**
Nomor Induk : 31502000023
Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI KURIKULUM MERDEKA DI MA NU MRANGGEN**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Rabu, 7 Dzulqodah 1445 H.
15 Mei 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Samsudin, S.Ag., M.Ag

Pembimbing I

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Ahmad Muflihah, S.Pd.I, M.Pd.

Penguji II

Hidayatus Sholihah, M.Pd., M.Ed.

Pembimbing II

Moh. Farhan, S.Pd.I, S.Hum., M.Pd.I.

ABSTRAK

Ariqul Irfan Yusan Nabil. 31502000023. **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI KURIKULUM MERDEKA DI MA NU MRANGGEN DEMAK.** Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Mei 2024.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan di bidang pendidikan, khususnya di sektor Pendidikan Profesi Guru sebagai upaya integrasi penerapan Kurikulum Merdeka pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari studi kepustakaan dan studi lapangan, melibatkan anggota kelas XI MIA 2 Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Mranggen sebagai objek penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Pendidikan Profesi Guru memberikan implikasi positif bagi guru dalam memahami struktur paradigma pembelajaran baru dan struktur kurikulum merdeka. Kemampuan guru dalam memahami konsep kurikulum yang berlaku merupakan salah satu kompetensi yang dapat membantu guru dalam menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang ideal di kelas. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Pendidikan Profesi Guru merupakan salah satu upaya yang positif untuk mengintegrasikan program peningkatan kompetensi guru dengan implementasi kurikulum merdeka di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan kompetensi guru yang terjadi setelah guru mengikuti pendidikan profesi guru antara lain: memahami pengelolaan pembelajaran, penguasaan keilmuan, sikap atau kepribadian, interaksi sosial, dan kepemimpinan.

Kata Kunci: analisis kebijakan; pendidikan profesi guru; kurikulum merdeka.

ABSTRACT

Ariqul Irfan Yusan Nabil. 31502000023. ANALYSIS OF TEACHER PROFESSIONAL EDUCATION POLICY (PPG) AND ITS IMPLICATIONS FOR INDEPENDENT CURRICULUM LEARNING IN MA NU MRANGGEN DEMAK. Undergraduate Thesis, Semarang: Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University, May 2024.

This research was conducted to analyze policies in the education sector, especially in the Teacher Professional Education sector as an effort to integrate the implementation of the Independent Curriculum at the primary and secondary education levels. The method used in this research is a combination of literature study and field study, involving members of class XI MIA 2 Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Mranggen as the object of field research. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive analysis techniques.

The research results show that the Teacher Professional Education program provides positive implications for teachers in understanding the structure of the new learning paradigm and the structure of the independent curriculum. The teacher's ability to understand the applicable curriculum concepts is one of the competencies that can help teachers create an ideal atmosphere for teaching and learning activities in the classroom. This research concludes that Professional Teacher Education is a positive effort to integrate teacher competency improvement programs with the implementation of an independent curriculum at the primary and secondary education levels. The increase in teacher competency that occurs after teachers take professional teacher education includes: understanding learning management, mastery of knowledge, attitude or personality, social interaction, and leadership.

Keywords: *policy analysis; teacher professional education; kurikulum merdeka.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Vokal

Vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal

Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 4 Transliterasi Maddah

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf ىber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Syahru Ramaḍān al-laṣī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

Segala puji kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN PAI KURIKULUM MERDEKA DI MA NU MRANGGEN DEMAK”.

Sholawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa salam* yang telah berjuang menyebarkan dakwah Islam sehingga kenikmatan iman dapat dirasakan hingga hari ini. Penulisan skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata satu (S-1) Program Studi Pendidikan Agama Islam di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Peneliti menyadari dalam proses penulisan skripsi ini diiringi berbagai bantuan, bimbingan, saran dan do'a dari seluruh pihak. Maka dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum. beserta seluruh jajaran wakil rektor.
2. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Drs. Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. beserta seluruh jajaran wakil dekan.

3. Ketua Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Bapak Ahmad Muflihin, S.Pd.I., M.Pd.I.
4. Dosen Wali Akademik, Bapak Toha Makhshun, S.Pd.I., M.Pd.I., yang selalu memberikan semangat dan nasehat selama peneliti menjalani studi di FAI Unissula sehingga gelar sarjana ini berhasil diraih.
5. Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib. yang senantiasa menasehati, membimbing, dan memberikan arahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Agama Islam Unissula, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan layanan akademik yang unggul sehingga peneliti mampu terus belajar mengembangkan minat bakat yang dimiliki.
7. Kepala Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Mranggen, Bapak H. Muslimin, S.Pd., M.Pd., beserta seluruh jajaran wakil kepala dan guru mata pelajaran yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan untuk peneliti selama melakukan penelitian di MA UN Mranggen.
8. Keluarga Besar Yayasan Mutiara Bunda Arafah yang selalu menjadi tempat pulang ternyaman bagi peneliti.
9. Ayahanda tercinta (alm.) Jumedi Santoso, yang telah hadir menjadi sumber inspirasi bagi peneliti untuk mengangkat isu pendidikan profesi ini. Peneliti merindukan kehadiranmu dan mendoakan yang terbaik untukmu selalu.

10. Ibunda tercinta, Wahyu Riyanti, yang tak pernah lelah mendoakan dan selalu hadir dalam setiap fase yang dilewati oleh peneliti. Ketangguhan dan kegigihanmu tidak dapat dinilai dengan harta benda semewah apapun didunia ini.
11. Adik-adikku tersayang, Adzin, Abudzar, dan Alayda, serta bibi yang semasa hidupnya selalu kebersamai peneliti, (alm.) Lek Mahmudah. Terima kasih telah hadir memberikan dukungan dan motivasi selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan di bangku perkuliahan, Tarbiyah angkatan 2020 yang selalu solid, kompak, optimis, dan saling mendukung satu sama lain hingga akhir penyusunan skripsi ini selesai.
13. Teman-teman anggota kelompok PLP MA NU Mranggen dan KKN Dombo VI yang senantiasa saling mendoakan dan saling menguatkan hingga proses penyusunan skripsi ini selesai.
14. Keluarga Yudha XLIV Resimen Mahasiswa Batalyon 908/Sawer Wiso Unissula, beserta seluruh staff, junior, dan senior yang telah mengajarkan kepada peneliti tentang arti kedisiplinan, kekeluargaan, dan pengorbanan.
15. Keluarga besar JQH Unissula yang selalu mengingatkan peneliti untuk tetap menjaga hafalan di tengah padatnya kegiatan penelitian.
16. Bapak Jamur Krispi dan Kentang Pumanisa yang selalu menghadirkan sajian terbaik sebagai camilan untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
17. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan motivasi dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih belum mendekati derajat sempurna dalam hal sistematika penulisan maupun susunan kalimat yang digunakan, oleh karenanya apabila pembaca skripsi ini ingin memberikan kritik dan saran, peneliti akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini memberikan dampak manfaat bagi peneliti pribadi dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 7 Mei 2024



Ariqul Irfan Yusan Nabil

NIM. 31502000023

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Kajian Pustaka	8
1. Teori Pendidikan Agama Islam	8
2. Pembelajaran PAI	15
3. Konsep Analisis Kebijakan	23
4. Pendidikan Profesi Guru	32
B. Penelitian Terkait	37
C. Kerangka Teori	43
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Definisi Konseptual	45
B. Jenis Penelitian	49
C. Setting Penelitian	51

1. Tempat Penelitian.....	51
2. Waktu Penelitian	52
D. Sumber Data.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Analisis Data.....	57
G. Uji Keabsahan Data	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Kebijakan PPG yang Terintegrasi dengan Implementasi Kurikulum Merdeka.....	63
B. Karakteristik Pembelajaran PAI di MA NU Mranggen Sebelum Implementasi Kebijakan PPG	73
C. Implikasi Kebijakan PPG terhadap Pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen	76
1. Aqidah Akhlak	77
2. Fiqih	80
3. Sejarah Kebudayaan Islam	83
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN.....	86
B. SARAN.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	XXXII

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Transliterasi Konsonan	viii
Tabel 2 Transliterasi Vokal Tunggal	viii
Tabel 3 Transliterasi Vokal Rangkap	viii
Tabel 4 Transliterasi Maddah	ix
Tabel 5 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase E.....	22
Tabel 6 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase F kelas XI.....	22
Tabel 7 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase F kelas XII	23
Tabel 8 Agenda Penelitian.....	52
Tabel 9 Perbedaan aspek dalam Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dengan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan	66
Tabel 10 Perbedaan PPG Kemendikbudristek dengan PPG Kemenag.....	72
Tabel 11 Struktur Organisasi MA NU Mranggen.....	II

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Surat Izin Penelitian	VI
Gambar 2 Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian di MA NU Mranggen	VII
Gambar 3 Surat Keterangan Melakukan Penelitian di MA NU Mranggen	VIII
Gambar 4 Suasana KBM Aqidah Akhlak di kelas XI MIA 2 MA NU Mranggen (19/03/2024).....	IX
Gambar 5 Suasana KBM Fiqih di kelas XI MIA 2 MA NU Mranggen (14/03/2024).	IX
Gambar 6 Suasana KBM Sejarah Kebudayaan Islam di kelas XI MIA 2 MA NU Mranggen (13/03/2024).....	X
Gambar 7 Wawancara dengan wakil kepala MA NU Mranggen bidang kurikulum, Dwi Sukmahroni, S.Pd.I. (27/03/2024).....	X
Gambar 8 Jadwal Mata Pelajaran Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024 di MA NU Mranggen	XXIV

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1 Profil Madrasah</i>	I
<i>Lampiran 2 Profil Guru PAI</i>	III
<i>Lampiran 3 Surat-surat</i>	VI
<i>Lampiran 4 Dokumentasi</i>	IX
<i>Lampiran 5 Instrumen Observasi Kelas dan Wawancara</i>	XI
<i>Lampiran 6 Jadwal Pelajaran</i>	XXIV
<i>Lampiran 7 Modul Ajar Kurikulum Merdeka</i>	XXV



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka memerlukan perencanaan yang matang agar transisi kurikulum dapat berjalan dengan baik. Salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam masa transisi kurikulum adalah menyelenggarakan sosialisasi yang dikemas dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, *workshop*, dan lain-lain. Guru dan tenaga pendidik sebagai tonggak penerapan kurikulum dalam kegiatan belajar mengajar di kelas memiliki peran yang sangat penting bagi implementasi kurikulum merdeka.¹ Harapannya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat memberikan pemahaman kepada guru tentang struktur kurikulum dan paradigma pembelajaran baru sesuai dengan pedoman Kurikulum Merdeka.

Di lain sisi, kebutuhan guru profesional didalam negeri terus meningkat. Profesionalitas guru dinyatakan dalam bentuk sertifikat pendidik. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dianggap telah memenuhi kompetensi sesuai dengan standar pendidikan nasional.² Pemerintah perlu mencari solusi yang mampu menyelesaikan dua problem diatas, yaitu permasalahan pemenuhan

¹ Achmad Fauzi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak," *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya* 18, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>.

² Elly Maryani, "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional," *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 2, no. 4 (2022).

kebutuhan guru bersertifikat dan upaya transisi kurikulum nasional. Pemerintah menekankan solusi yang dibuat harus mampu menyelesaikan permasalahan dengan mengedepankan prinsip integrasi dan berkelanjutan.

Indonesia sejatinya telah mengalami beberapa kali perubahan kurikulum nasional. Menurut penelitian Firmansyah, perubahan kurikulum kerap menjadi kesulitan tersendiri bagi guru. Kesulitan yang dialami seperti beban administrasi yang diemban oleh guru, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang rumit, adaptasi struktur kurikulum terbaru, dan perubahan indikator dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik.³ Perubahan kurikulum nasional yang semestinya membawa kualitas pendidikan di Indonesia menuju arah yang lebih baik, beresiko menjadi sebaliknya yang membawa kualitas pendidikan Indonesia semakin terpuruk.

Untuk mengantisipasi problematika transisi kurikulum yang berulang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan penyegaran pada program Pendidikan Profesi Guru. Kurikulum pembelajaran didalam Pendidikan Profesi Guru yang selama ini berjalan sendiri mulai direkonstruksi untuk kebutuhan implementasi Kurikulum Merdeka. Pendidikan Profesi Guru menjadi langkah integrasi kurikulum pendidikan tinggi dengan pendidikan jenjang dasar dan menengah. Kebijakan

³ haris Firmansyah, "Proses Perubahan Kurikulum K-13 Menjadi Kurikulum Merdeka," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4910>.

ini dipilih mengingat bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan proses terintegrasi yang diawali dengan proses pengembangan sumber daya manusia itu sendiri.

Sebagai sebuah program, Pendidikan Profesi Guru (PPG) tentunya membawa implikasi terhadap karakteristik kegiatan belajar mengajar didalam kelas, salah satu yang terdampak yaitu karakteristik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). Peningkatan kompetensi guru melalui Pendidikan Profesi Guru diharapkan mampu membawa dampak yang signifikan bagi kemampuan mengajar guru. Pembelajaran PAI yang selama ini dikenal menekankan pembelajaran hanya melalui metode ceramah, pada kurikulum merdeka ini dituntut untuk mampu memberikan pemahaman kepada peserta didik dengan pendekatan yang lebih variatif, termasuk salah satunya adalah melalui penugasan proyek berbasis Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Peneliti memilih lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Mranggen, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki kondisi ideal serta memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini, diantaranya: memiliki guru aktif yang telah mengikuti Pendidikan Profesi Guru, menerapkan Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam, dan memiliki jenjang pendidikan menengah setingkat SMA/MA.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki urgensi analitik, dimana hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu kajian akademik guna memberikan evaluasi mengenai dampak kebijakan Pendidikan Profesi Guru yang diberlakukan pada era Kurikulum Merdeka terhadap proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya dalam lingkup Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Mranggen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kebijakan PPG yang terintegrasi dengan implementasi Kurikulum Merdeka ?
2. Bagaimana karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen sebelum implementasi kebijakan PPG ?
3. Bagaimana implikasi kebijakan PPG terhadap karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kebijakan PPG yang terintegrasi dengan implementasi Kurikulum Merdeka.
2. Untuk mengetahui karakteristik pembelajaran PAI di MA NU Mranggen sebelum implementasi kebijakan PPG.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan PPG terhadap karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai analisis kebijakan Pendidikan yang berkaitan dengan Pendidikan Profesi Guru serta mengetahui dampak dari implementasi kebijakan ini bagi penerapan Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.
2. Secara praktis:

- a. Bagi Sekolah

Sebagai bentuk upaya kontrol dalam rangka penjaminan mutu serta peningkatan kualitas pendidikan di lembaga sekolah melalui pelaksanaan kebijakan Pendidikan Profesi Guru yang terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka.

b. Bagi Guru

Sebagai bahan kajian akademik mengenai urgensi suatu kebijakan di bidang pendidikan yang membawa dampak bagi peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas maupun di lingkup sekolah.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi dalam upaya penyusunan kebijakan yang efektif di bidang pendidikan agar kebijakan yang diterapkan dapat membawa peningkatan mutu serta kualitas pendidikan bangsa.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi dan menguraikan isi penelitian secara komprehensif, maka skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

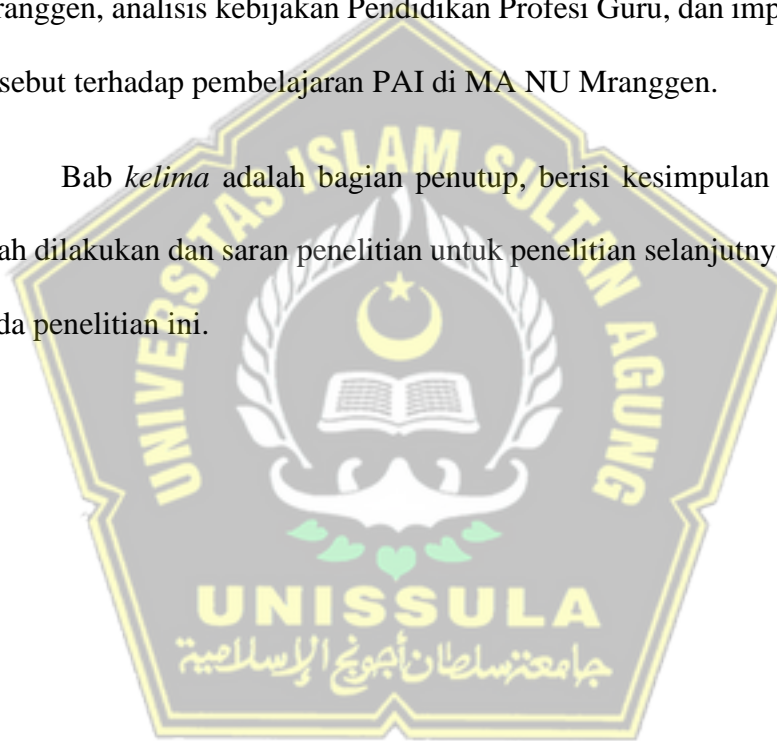
Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang didalamnya membahas tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, dalam bab ini akan dibahas mengenai berbagai teori maupun konsep yang berkaitan dengan Pendidikan Agama Islam, pembelajaran PAI, analisis kebijakan, dan Pendidikan Profesi Guru.

Bab *ketiga*, pada bab ini akan diuraikan mengenai definisi konseptual, jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

Bab *keempat*, dalam bab ini akan diuraikan hasil dan pembahasan penelitian berisi gambaran umum mengenai pembelajaran PAI di MA NU Mranggen, analisis kebijakan Pendidikan Profesi Guru, dan implikasi kebijakan tersebut terhadap pembelajaran PAI di MA NU Mranggen.

Bab *kelima* adalah bagian penutup, berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan saran penelitian untuk penelitian selanjutnya yang mengacu pada penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Teori Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa definisi Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadits.⁴

Menurut Zakiah Daradjat, Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha terencana untuk membimbing peserta didik dalam memahami ajaran Islam secara menyeluruh sehingga mereka mampu menjadikan Islam sebagai pedoman hidup.⁵ Zakiah mengaitkan Pendidikan Agama Islam dengan tujuan hidup seorang muslim. Dengan kata lain, Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan untuk menuntun manusia ke jalan kebenaran sesuai dengan ketetapan Allah didalam Al-Qur'an maupun Hadits.

⁴ Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah* (Jakarta: JDIH Kemendibudristek RI, 2006).

⁵ Zakiah Daradjat, *Metodologi Pengajaran Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Definisi yang dikemukakan oleh Zakiah memiliki relevansi dengan pengajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah, dimana materi belajar Pendidikan Agama Islam di madrasah dibagi menjadi empat mata pelajaran yang berbeda, yaitu Qur'an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam. Pemisahan mata pelajaran ini bertujuan agar peserta didik mampu mendalami ilmu agama secara komprehensif demi menggapai tujuan hidup seorang muslim sejati.

Apabila melihat konteks pendidikan secara umum yang berlaku di Indonesia, Pendidikan Agama Islam adalah suatu program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai islam melalui proses pembelajaran. Dalam kurikulum nasional, mata pelajaran PAI merupakan mata pelajaran wajib di sekolah umum mulai dari jenjang Pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi. Kurikulum PAI disusun dan dirancang yang disesuaikan dengan standar kompetensi masing-masing jenjang Pendidikan.

b. Dasar Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam sebagai suatu konsep membutuhkan landasan sebagai dasar Pendidikan Agama Islam. Firmansyah menjelaskan bahwa Pendidikan Agama Islam memiliki dasar sebagai berikut:⁶

⁶ Imam Firmansyah, "Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi," *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–92.

1) Dasar Yuridis

Dasar Yuridis adalah dasar yang melandasi terselenggaranya pembelajaran mata pelajaran PAI berdasarkan norma hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Menurut Firmansyah, dasar yuridis PAI mencakup dasar ideal, dasar struktural, dan dasar operasional. Dasar ideal adalah dasar yang bersumber dari pandangan hidup bangsa Indonesia, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengamalan sila pertama diwujudkan dengan terselenggaranya pendidikan-pendidikan keagamaan, termasuk didalamnya adalah Pendidikan Agama Islam bagi para pemeluk agama Islam.

Dasar struktural merupakan dasar pelaksanaan pendidikan agama yang dirumuskan untuk mewujudkan sila pertama Pancasila. Dalam Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang *Eka Prasetya Pancakarsa* (Pendidikan Agama) bahwa sila pertama dalam Pancasila, memiliki arti bangsa Indonesia menjunjung tinggi keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut.

Dasar operasional memiliki arti sebagai dasar yang mengatur secara langsung pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah di Indonesia, baik swasta maupun negeri. Dasar operasional yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Menurut peraturan tersebut pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan:

*“Pendidikan agama dan keagamaan itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya”.*⁷

2) Dasar Religius

Dasar religius adalah dasar yang diturunkan dari ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Dasar ini menjadi penting dalam pendidikan Islam. Sebab dengan dasar ini, semua kegiatan pendidikan menjadi bermakna. Perintah Allah untuk membekali diri dengan ilmu secara tersirat sudah ada

⁷ Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. (Jakarta: Biro Hukum dan Politik, Kementerian Sekretaris Negara, 2007).

sejak turunnya wahyu pertama kali, yaitu QS. al-‘Alaq yang diawali dengan perintah membaca.⁸

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١

Bacalah dengan menyebut nama Rabb-mu, Dzat yang menciptakan. (QS. al-‘Alaq : 1)

Hikmah dari ayat tersebut tentunya manusia wajib membekali diri dengan ilmu guna memahami agama. Dengan memahami agama, semua aktivitas kependidikan menjadi bermakna, berdaya, dan bernilai ibadah.

3) Dasar Sosial-Psikologis

Pada hakikatnya semua manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan adanya pedoman berupa agama. Bimbingan tentang nilai-nilai agama sangat diperlukan sebagai upaya kontrol diri bagi manusia agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah.⁹ Pendidikan Agama Islam diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengajaran nilai-nilai keagamaan dalam bentuk seperangkat materi pembelajaran yang disusun ke dalam kurikulum Pendidikan nasional.

⁸ A B Tjahjono et al., *Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Budaya Akademik Islami (BUDAI)* (CV. Zenius Publisher, 2023), https://books.google.co.id/books?id=MN_rEAAAQBAJ. (Diakses pada 6 Januari 2024 pukul 10.14 WIB)

⁹ Tjahjono et al.

c. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam

Fungsi utama keberadaan Pendidikan Agama Islam menurut Hafsah adalah mengarahkan dan membimbing manusia agar dapat menjalankan amanah dari Allah sebagai seorang hamba sekaligus menjadi *khalifatullah* di muka bumi.¹⁰ Apabila ditinjau dari segi operasionalnya, Pendidikan Agama Islam memiliki fungsi sebagai alat untuk memasukkan nilai-nilai luhur keislaman dalam tradisi kebudayaan masyarakat.

Hasan Langgulung menyebutkan tujuan pendidikan agama Islam identik dengan tujuan Islam itu sendiri. Tujuan Pendidikan Agama Islam mengacu pada perintah Allah yang termaktub dalam al-Qur'an dan Hadits, khususnya yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia serta tugas-tugas yang diamanatkan Allah kepadanya.¹¹ Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat,

“Aku hendak menjadikan khalifah1 di bumi...” (QS. al-Baqarah:30)

¹⁰ Hafsah, “Karakteristik Pembelajaran PAI Dalam Pendidikan Formal,” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): 221–37.

¹¹ Hasan Langgulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003).

Hasan Langgulung memaknai Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan tentang ilmu agama yang mendidik manusia hingga mereka menyadari tujuan penciptaannya di muka bumi. Untuk mencapai tingkatan tersebut, tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar dan metode yang tepat agar tidak tersesat dalam memahami tujuan dan fungsi Pendidikan Agama Islam.

d. Faktor – Faktor Pendidikan Agama Islam

Menurut Khairunnisa, Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah esensial dakwah bersifat dogmatis dan statis sejak zaman Rasulullah, tetapi metode penyampaian dalam Pendidikan agama islam selalu bergerak dinamis mengikuti perkembangan zaman.¹² Pada era teknologi seperti saat ini pun, metode penyampaian pendidikan agama islam mengalami akselerasi dengan bantuan media elektronik melalui kanal youtube, situs web dakwah, dan sejenisnya.

Pendidikan Agama Islam memiliki faktor-faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses kegiatan belajar mengajar. Mengutip dari La Mahiddin, faktor-faktor yang dimaksud yaitu:¹³ karakteristik bidang studi PAI, karakteristik peserta didik, tujuan

¹² Khairunnisa et al., “Strategi Guru PAI: Problematika Dan Solusi Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik,” *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 2 (December 2022): 133–49.

¹³ La Mahiddin, Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia), *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 1, 2021.

instruksional, metode pengajaran, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan kendala dalam pembelajaran PAI.

2. Pembelajaran PAI

a. Pengertian Pembelajaran

Pembelajaran pada hakikatnya adalah terjadinya interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku kearah yang lebih baik.¹⁴ Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha pengembangan minat bakat peserta didik secara terstruktur dengan melakukan aktivitas-aktivitas tertentu yang direncanakan sehingga peserta didik mampu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tugas perkembangannya.

Menurut Oemar Hamalik, pembelajaran adalah serangkaian unsur-unsur prosedur dan bahan belajar yang saling berkaitan guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan bersama.¹⁵ Pembelajaran dan Pendidikan memang dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Pembelajaran merupakan suatu proses yang melibatkan pendidik untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik serta meningkatkan kemampuannya dalam menyusun pengetahuan baru. Sedangkan pendidikan adalah kata

¹⁴ Daryanto and Syaiful Karim, *Pembelajaran Abad 21* (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017).

¹⁵ Oemar Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

kerja yang merujuk pada proses terjadinya pembelajaran yang telah direncanakan secara mendetail dan komprehensif.

b. Strategi dan Metode Pembelajaran PAI

Strategi adalah perencanaan prosedur pembelajaran beserta komponen materi pembelajaran didalamnya yang digunakan untuk membantu guru mencapai target atau pembelajaran. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengeksekusi persiapan yang telah dirancang dalam strategi pembelajaran.

Pendidikan Agama Islam sebagai sebuah mata pelajaran yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan secara universal membutuhkan metode pembelajaran yang efektif agar materi pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik.¹⁶ Beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik Pendidikan Agama Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Ceramah, merupakan salah satu metode paling banyak digunakan dalam penyampaian materi belajar

PAI. Metode ini paling cocok digunakan untuk materi Sejarah Kebudayaan Islam yang mengajarkan nilai-nilai kehidupan berdasarkan kisah sejarah nabi dan para sahabat.

¹⁶ Muhammad Naim, Abd Rajab, and Muhammad Alip, "Esensi Metode Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam (Essence of Islamic Education Perspective Learning Method)," *ISTIQRA': Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020).

- 2) Metode *Amts'al* (Perumpamaan), metode ini disampaikan dengan cara memberikan perumpamaan kepada objek materi yang sedang dibahas. Metode ini paling cocok digunakan untuk materi Qur'an Hadits.
- 3) Metode *Tarhib wa Tarhib* (hadiah dan sanksi), metode ini menggunakan penghargaan dan hukuman sebagai upaya pembiasaan disiplin bagi peserta didik. Metode ini cocok digunakan untuk materi Aqidah Akhlak.
- 4) Metode demonstrasi, merupakan metode yang mengedepankan praktek langsung agar peserta didik mampu memahami materi pembelajaran secara jelas dan nyata. Metode ini cocok digunakan untuk materi Fiqh yang banyak membahas praktik-praktik ibadah.

c. Materi Pembelajaran PAI

Materi pembelajaran dalam lingkup Pendidikan agama islam bersifat universal karena mencakup seluruh aspek nilai-nilai dan pandangan hidup manusia. Menurut Sulaiman,¹⁷ pada dasarnya materi Pendidikan Agama Islam terbagi menjadi tiga inti pembahasan, yaitu:

¹⁷ Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI): Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017).

Aqidah (dimensi kepercayaan), Akhlaq (dimensi komitmen), dan Syariah (dimensi perilaku ritual dan sosial).

Dalam kaitannya dengan materi pembelajaran PAI sesuai kurikulum yang berlaku di Indonesia, terdapat empat mata pelajaran yang tergolong dalam kategori Pendidikan Agama Islam, yaitu: Aqidah Akhlak, Fiqh, Qur'an Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Satuan Pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama (dalam bentuk MI, MTs, dan MA) diwajibkan mempelajari keempat mata pelajaran tersebut secara terpisah dan menyeluruh. Sedangkan satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi biasanya menggabungkan keempat mata pelajaran tersebut menjadi satu mata pelajaran bernama Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti.

d. Model Pembelajaran PAI

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menjadi ciri khas guru dalam mengendalikan proses belajar mengajar dari awal hingga akhir. Model pembelajaran bentuknya lebih umum karena merupakan bingkai yang mencakup strategi, metode, dan pendekatan dalam pembelajaran. Ada beberapa model pembelajaran yang banyak digunakan dalam pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka, antara lain:

- 1) Model materi ajar, merupakan model pembelajaran yang menitikberatkan pada penggunaan konten media sebagai bahan materi pembelajaran. Model ini selaras dengan kurikulum merdeka yang menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi.
- 2) Model kegiatan belajar mengajar, merupakan model belajar yang menitikberatkan pada proses interaksi guru dan peserta didik didalam pembelajaran. Model ini biasanya menggunakan pendekatan *student oriented* dan mulai banyak digunakan pada era Kurikulum Merdeka yang menerapkan prinsip Merdeka Belajar.
- 3) Model ASSURE, merupakan akronim dari beberapa langkah pembelajaran yaitu:¹⁸ *Analyze learner* (menganalisa peserta didik), *State objective* (perumusan kompetensi dan tujuan pembelajaran), *Select method* (pemilihan metode belajar), *Utilize media and materials* (penggunaan media dan bahan ajar), *Require learner participation* (pengembangan peran peserta didik), dan *Evaluate and Revise* (penilaian dan perbaikan).

¹⁸ Rozi Iskandar and Farida F, "Implementasi Model ASSURE Untuk Mengembangkan Desain Pembelajaran Di Sekolah Dasar," *Jurnal Basicedu* 4, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.468>.

e. Evaluasi Pembelajaran PAI

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses pembelajaran PAI. Berkaca pada pendapat Bloom yang dikutip oleh Daryanto, perubahan yang ideal dilihat dari tiga aspek: 1) Aspek kognitif atau pengetahuan intelektual, 2) Aspek afektif yang didasarkan pada nilai atau sikap, 3) Aspek psikomotorik atau keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik.¹⁹ Jika diterjemahkan dalam materi belajar PAI, maka dapat diuraikan bahwa evaluasi terhadap kognitif meliputi aspek pemahaman materi pokok PAI secara mentah, afektif lebih menekankan pada unsur akhlak dan pokok keimanan, dan terakhir evaluasi aspek psikomotorik ditekankan pada unsur pelaksanaan tata cara ibadah.

Evaluasi pembelajaran PAI dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya mengacu pada asas evaluasi pembelajaran yang tepat. Secara umum, asas evaluasi pembelajaran ada enam, yaitu: objektif, berkesinambungan, komprehensif, valid, reliabel, dan sesuai dengan indikator ketercapaian pembelajaran.

f. PAI Kurikulum Merdeka

Sebagai sebuah mata pelajaran, PAI membutuhkan kurikulum sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Oemar Hamalik dalam

¹⁹ Daryanto and Karim, *Pembelajaran Abad 21*.

buku “Kurikulum dan Pembelajaran” menyebutkan, istilah kurikulum berasal dari Bahasa latin *Curriculae* artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada awal mula kemunculan istilah ini, pengertian kurikulum mengacu pada jangka waktu Pendidikan yang harus ditempuh oleh peserta didik untuk memperoleh ijazah.²⁰

Indonesia saat ini menerapkan Kurikulum Merdeka dalam sistem Pendidikan nasional. Kurikulum Merdeka memiliki empat karakteristik, yaitu: (a) Pengembangan *Soft Skills* dan Karakter, (b) Pemfokusan pada materi esensial untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik, (c) pembelajaran fleksibel yang memberikan keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian dan perkembangan peserta didik, (d) Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau biasa disebut P5.²¹

Struktur Kurikulum Merdeka untuk jenjang SMA terbagi menjadi dua fase, yaitu fase E untuk kelas X (sepuluh) dan fase F untuk kelas XI (sebelas) dan kelas XII (dua belas). Adapun tipe pembelajaran yang wajib dilaksanakan didalam kelas terbagi menjadi dua, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran kokurikuler. Alokasi waktu pembelajaran kokurikuler ditargetkan sebanyak 30 persen dari

²⁰ Hamalik, *Kurikulum Dan Pembelajaran*.

²¹ Laman resmi Kurikulum Merdeka melalui website: <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/> , diakses pada 6 Januari 2024 pukul 19.54 WIB.

total keseluruhan jam pelajaran dalam satu tahun.²² Berikut adalah tabel alokasi waktu jam pelajaran (khusus mapel Pendidikan Agama Islam) yang bersumber dari Permendikbudristek RI nomor 12 tahun 2024:²³

Fase E (kelas X). Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila per Tahun	Total JP per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	72	36	108

Tabel 5 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase E

Fase F (kelas XI). Asumsi 1 tahun = 36 minggu dan 1 JP = 45 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila per Tahun	Total JP per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	72	36	108

Tabel 6 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase F kelas XI

²² Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan, *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah* (Jakarta: JDIH Kemendikbudristek RI, 2024).

²³ Kementerian Pendidikan.

Fase F (kelas XII). Asumsi 1 tahun = 32 minggu dan 1 JP = 45 menit

Mata Pelajaran	Alokasi Intrakurikuler per Tahun	Alokasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila per Tahun	Total JP per Tahun
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	64	32	96

Tabel 7 Alokasi waktu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada Fase F kelas XII

3. Konsep Analisis Kebijakan

a. Pengertian Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah proses penjabaran pokok-pokok suatu hal yang saling berhubungan untuk menghasilkan suatu pemahaman yang tepat dan ideal. Nana Sudjana menyatakan bahwa analisis adalah usaha menguraikan suatu inti menjadi bagian-bagian hingga jelas susunan dan hierarkinya.²⁴

Apabila melihat dari aktivitasnya, analisis adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan temuan baru terhadap objek yang akan diamati oleh peneliti dengan memanfaatkan barang bukti yang akurat pada objek pengamatan tersebut. Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa memeriksa, memilah, mengurai, dan mengelompokkan suatu objek tertentu untuk

²⁴ Nana Sudjana, 2014, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo).

dikategorikan menjadi jenis tertentu, kemudian ditelusuri korelasinya, dan terakhir ditafsirkan maknanya.

b. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan memiliki arti “rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar haluan dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak pada tingkat organisasi, pemerintahan, dan sebagainya”.²⁵ Apabila didefinisikan secara manual, kebijakan berarti seperangkat peraturan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan wewenang dan tugas pada tingkat organisasi.

Secara umum, kebijakan adalah tindakan yang digunakan menyelesaikan permasalahan di ruang publik. Dalam hal ini, penyelenggara kebijakan yang dimaksud bisa saja adalah individu, kelompok, atau golongan yang telah diberikan kewenangan tertentu. Secara khusus, kebijakan dapat dibagi sesuai dengan sector publik yang dinaunginya, seperti kebijakan di bidang hukum, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang pendidikan, dan sebagainya.

Menurut Widodo, dalam praktiknya kebijakan selalu bersifat umum untuk masyarakat luas sehingga frasa kebijakan selalu

²⁵ “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021, diakses melalui website: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 29 Januari 2024 pukul 10.18 WIB.

dipadankan menjadi kebijakan publik. Kebijakan publik yang efektif harus mengandung beberapa unsur sebagai berikut:²⁶

- a) Suatu kebijakan harus memiliki motif tujuan tertentu.
- b) Suatu kebijakan berisi pola tindakan penyelesaian masalah yang solutif dan komprehensif
- c) Kebijakan publik harus didasarkan pada peraturan di atasnya serta mengakomodir elastisitas peraturan turunan. Peraturan tersebut bersifat otoritatif dan mengikat.

Kebijakan bersifat umum, mengikat, dan memiliki keputusan khusus yang melekat dibawahnya. Sebagai sebuah pedoman umum, kebijakan harus memiliki empat elemen penting didalamnya, yaitu: input, tujuan, perangkat, serta analisis dampak.²⁷ Analisis dampak pun harus disusun secara objektif dengan mencantumkan hal baik yang diinginkan maupun hal tidak baik yang beresiko muncul sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

²⁶ Joko Widodo, 2023, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (Malang: Media Nusa Creative).

²⁷ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik. Edisi Kedua*, 2nd ed. (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

Berdasarkan stratifikasi perumusannya, kebijakan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan:²⁸

1) Kebijakan strategis / Kebijakan Umum

Tingkat kebijakan umum adalah tingkat kebijakan yang lingkungannya adalah mengenai masalah-masalah yang bersifat strategis. Kebijakan pada tingkatan ini digunakan untuk mencapai kondisi ideal secara kolektif dalam situasi dan kondisi apapun. Hasilnya dapat berbentuk Undang – undang (UU), Peraturan Pemerintah, Tap MPR, dan peraturan mayor lainnya yang setingkat.

2) Kebijakan Manajerial

Kebijakan manajerial adalah tingkat kebijakan yang disusun dalam sebuah bidang utama pada area pemerintahan. Kebijakan ini adalah bentuk penjabaran dari kebijakan umum. Kebijakan manajerial berfungsi untuk merumuskan strategi dan administrasi publik serta prosedur pelaksanaan dari kebijakan umum di atasnya sesuai dengan bidang tertentu. Wewenang kebijakan manajerial dalam hukum administrasi tata negara biasanya diemban oleh menteri dan pejabat setingkat menteri.

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Era Globalisasi* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016).

Contoh kebijakan manajerial yaitu Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, dan dalam keadaan tertentu dapat berupa Surat Edaran Menteri.

3) Kebijakan Teknis Operasional

Kebijakan teknis operasional adalah kebijakan yang meliputi sebuah prosedur pelaksanaan dalam penerapan suatu kebijakan. Bentuknya adalah sebuah peraturan teknis, untuk mengimplementasikan suatu rencana, kegiatan dan program.²⁹ Kebijakan pada tingkatan ini artinya bersentuhan langsung dengan publik selaku pemilik kepentingan.

Contoh kebijakan pada tingkatan ini adalah berupa Instruksi, Peraturan, dan Keputusan Pimpinan Departemen atau Non Departemen.

Pada intinya, kebijakan menjadi sebuah pedoman dalam menyusun rencana suatu pelaksanaan, pekerjaan, kepemimpinan, dan cara dalam bertindak memecahkan masalah. Kebijakan juga digunakan untuk manajemen di setiap lini dalam upaya mencapai sasaran yang dituju. Dengan kata lain, kebijakan adalah pedoman dalam pengambilan sebuah ketetapan yang bersifat publik.

²⁹ Winarno.

c. Pengertian Analisis Kebijakan

Menurut William Dunn, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan metode inkuiri dan argumentasi berganda untuk menghasilkan informasi kebijakan yang sesuai dalam suatu proses pengambilan keputusan dalam rangka memecahkan masalah kebijakan.³⁰ Dengan kata lain, analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu yang berusaha memecahkan masalah kebijakan publik dengan menggunakan metode, teori dan substansi penemuan data dari segi ilmu-ilmu sosial dan filosofi sosial politis.

Prof. Nanang Fattah mengutip pendapat Duncan MacRae (1976) dalam buku “Analisis Kebijakan Pendidikan” mengartikan bahwa analisis kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta – fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik.³¹ Menurut beliau, pemecahan masalah kebijakan disusun menggunakan metode dan prosedur yang terstruktur. Proses analisis membutuhkan pemikiran kognitif individu, sedangkan penetapan kebijakan didasarkan pada sikap politis.

³⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemah Bahasa Indonesia)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000).

³¹ Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, ed. Pipih Latifah (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).

Winarno dan Ismawan menjelaskan, bahwa analisis kebijakan adalah teknik pemeriksaan yang dilakukan untuk mencapai tingkat kedalaman pemahaman yang mendetail tentang isu-isu sosial politis. Analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan identifikasi sebab akibat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan.³² Secara umum, terdapat enam tahapan dalam analisis kebijakan menurut Winarno dan Ismawan, yaitu: mendefinisikan masalah publik yang sedang terjadi, menentukan kriteria evaluasi dan indikator capaian yang akan dituju, mengidentifikasi alternatif kebijakan, uji kelayakan alternatif kebijakan, memberikan rekomendasi kebijakan terbaik, mengkomunikasikan hasil analisis kebijakan.

Kemunculan analisis kebijakan dijelaskan sebagai respon atas melimpahnya produk kebijakan yang tidak memuaskan. Kebijakan dianggap tidak menyelesaikan masalah yang ada, tetapi justru memunculkan masalah baru. Analisis kebijakan diperlukan untuk memahami bagaimana langkah yang sesuai dalam proses penyusunan kebijakan. Kebijakan yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk laporan guna dipublikasikan sesuai dengan kepentingan publik.

³² Budi Winarno and Indra Ismawan, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

Publikasi hasil analisis kebijakan harus tetap mempertimbangkan aspek etika, moral, dan sosial budaya masyarakat

d. Model Analisis Kebijakan

Ada tiga model analisis kebijakan menurut Dunn, yaitu model prospektif, retrospektif dan integratif.³³ Model prospektif, adalah model analisis kebijakan yang dilaksanakan sebelum suatu kebijakan diberlakukan. Dari definisi tersebut, model ini kemudian diidentikkan dengan model analisis prediktif, atau dalam bahasa lain disebut dengan ramalan (*forecasting*). Model prospektif menggunakan cara dengan melakukan penelusuran akan kemungkinan-kemungkinan pemberlakuan kebijakan yang akan diterapkan. Adapun model retrospektif ialah antonim dari model prospektif, yaitu analisis yang dilakukan setelah kebijakan itu dilaksanakan. Model ini sering dikenal dengan sebutan model analisis evaluatif, artinya menganalisa dampak yang terjadi akibat pelaksanaan kebijakan. Adapun model integratif, yaitu perpaduan kedua model di atas. Model ini juga dinamakan dengan model analisis holistik atau komprehensif, karena analisisnya dilakukan terhadap konsekuensi dari sesudah ataupun sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini

³³ William N. Dunn, *Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*, ed. Muhadjir Darwin, Indonesia Version, vol. 9 (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001).

biasanya menggunakan teknik prediksi dan evaluasi secara terintegrasi dan proporsional.³⁴

Model analisis kebijakan pada penelitian skripsi yang saya gunakan ialah model retrospektif. Model analisis retrospektif dipilih karena analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis evaluatif terhadap suatu kebijakan yang telah ditetapkan dan sedang berlaku di masa kini.

Sebagai sebuah ilmu sosial terapan yang menggunakan teknik argumentasi berganda, tentunya analisis kebijakan dilakukan dengan memperhatikan metode dan tahapan-tahapan prosedur ilmiah yang terstruktur. Metode ini pada umumnya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan ilmu – ilmu sosial dan ilmu profesi lainnya. Metode dalam analisis kebijakan meliputi uraian (*description*), ramalan (*prediction*), penilaian (*appraisal*), definisi (*definition*), dan penyusunan struktur masalah (*problem structuring*).³⁵ Semua metode tersebut melibatkan pertimbangan yang berbeda, yaitu pertimbangan untuk menerima atau menolak suatu penjelasan, pertimbangan untuk menguatkan atau melemahkan alasan suatu tindakan, pertimbangan untuk memilih atau

³⁴ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemah Bahasa Indonesia)*.

³⁵ Winarno and Ismawan, *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*.

tidak memilih suatu kebijakan, dan pertimbangan untuk menggambarkan suatu kondisi dari sudut pandang yang lain.

4. Pendidikan Profesi Guru

a. Pengertian Pendidikan Profesi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 17 ayat (1) menjelaskan pengertian Pendidikan Profesi bahwa “Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana (S1) yang mempersiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan/kualifikasi keahlian khusus. Lulusan Pendidikan profesi akan mendapatkan gelar profesi sebagai bukti telah memiliki kualifikasi professional sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”.³⁶

Menurut Epon Ningrum, pendidikan profesi adalah jenis Pendidikan tinggi yang bertujuan guna mempersiapkan serangkaian kemampuan spesifik untuk menempati profesi yang relevan.³⁷ Salah satu contoh terselenggaranya pendidikan profesi adalah program pendidikan profesi guru di Indonesia.

Dari kedua pendapat diatas, dapat diketahui bahwa pendidikan profesi merupakan jenjang pendidikan tinggi yang dikhususkan untuk

³⁶ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi* (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012).

³⁷ Ningrum, “Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG).”

membekali diri dengan ilmu-ilmu keahlian yang relevan dengan profesi yang akan digeluti. Lulusan pendidikan profesi selain dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu yang telah dipelajari secara teoritis maupun praktis, juga harus menegakkan etika profesi yang mengikatnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 negara Republik Indonesia mengklasifikasikan pendidikan tinggi dalam 3 jenis, yaitu:

- 1) Pendidikan akademik: mencakup sarjana (S1), magister (S2), dan doctoral (S3).
- 2) Pendidikan vokasi: mencakup ahli pratama, ahli muda, dan ahli madya.
- 3) Pendidikan profesi atau spesialis.

b. Pengertian Guru

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah jalur pendidikan formal.³⁸

Guru memiliki fungsi dan tugas yang telah diatur didalam peraturan

³⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2005).

perundang-undangan. Untuk menjalankan seluruh fungsi dan tugas tersebut guru dituntut untuk memiliki kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi professional.

Dalam konteks literatur islam, istilah guru lekat dengan sebutan *Mudarris*, *Muallim*, *Murabbi*, *Mursyid*, dan *Muaddib*. Adapun penyebutan *ustadz* adalah penyebutan secara bahasa semata, tidak ada pengertian secara istilah dalam penyematan label *ustadz* pada status guru. Penjelasan dari kelima istilah yang tadi disebutkan, mengutip dari Khoirul Anam antara lain yaitu:³⁹

- 1) *Mudarris*, adalah istilah yang digunakan untuk orang yang memiliki kecerdasan dan kemampuan menyampaikan pelajaran dalam tataran teoritis kepada peserta didik.
- 2) *Muallim*, artinya orang yang mampu menyampaikan ilmu dan memahamkan peserta didiknya tentang penerapan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) *Murabbi*, adalah istilah paling agung yang melekat pada diri seorang guru. Murabbi diartikan sebagai pencipta, pemelihara, pengatur, dan sosok yang memperbaiki kondisi intelektual dan

³⁹ Khoirul Anam, "Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 86–94.

spiritual peserta didik dengan pendekatan yang berwibawa.⁴⁰ Di Indonesia, kultur murabbi diidentikkan dengan ustadz atau kyai.

- 4) *Mursyid*, adalah sebutan untuk guru yang memiliki ketaatan dan kedalaman spiritual. Seorang mursyid kebanyakan berusaha untuk membimbing peserta didiknya melalui ceramah dan dakwah yang menekankan pada penerapan akhlak mulia.
- 5) *Muaddib*, artinya orang yang memiliki wawasan luas dengan dilandasi adab dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Muaddib cenderung mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kehidupan melalui metode keteladanan.

c. Kebijakan tentang Pendidikan Profesi Guru

Program Pendidikan Profesi Guru adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk meningkatkan kompetensi profesional seorang guru dalam rangka memajukan pendidikan di Indonesia. Pengelolaan kebijakan mengenai pendidikan profesi guru harus berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku.⁴¹

Kebijakan yang mengatur program Pendidikan Profesi Guru dievaluasi dan diperbaharui dalam tempo waktu tertentu mengikuti

⁴⁰ Tjahjono et al., *Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Budaya Akademik Islami (BUDAI)*. Diakses pada 22 Maret 2024 pukul 10.12 WIB

⁴¹ Hanifa Zulfitri, Ndy Putri Setiawati, and Ismaini, "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru," *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra* 19, no. 2 (2019): 130–36.

perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kurikulum nasional. Pembaruan tersebut dibutuhkan sebagai upaya mengintegrasikan standar pembelajaran didalam kurikulum dengan kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di kelas.

Pada era Kurikulum Merdeka, kebijakan pendidikan profesi guru dibagi menjadi kewenangan milik dua kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menyelenggarakan pendidikan profesi guru bidang mata pelajaran umum, dan Kementerian Agama yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru bidang mata pelajaran agama. Selain pembagian kewenangan, terdapat klasterisasi jenjang pendidikan dalam Pendidikan Profesi Guru, yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan untuk guru pemula yang baru saja lulus dari jenjang perguruan tinggi, dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk guru yang telah aktif sekurang-kurangnya minimal 2 tahun dan terdaftar di data pokok Pendidikan (Dapodik) kemendikbudristek bagi guru umum atau Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag bagi guru agama.

B. Penelitian Terkait

Penelitian mengenai analisis kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Banyak sekali penelitian mengenai analisis kebijakan pendidikan dipublikasi melalui artikel ilmiah, diangkat menjadi bahan diskusi, kajian ilmiah, skripsi, thesis, maupun disertasi. Penelitian yang saya lakukan merupakan salah satu bentuk penelitian tentang analisis kebijakan di bidang pendidikan mengenai Pendidikan Profesi Guru. Berikut adalah beberapa penelitian terkait yang menjadi bahan rujukan penelitian ini:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru di Indonesia (*Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*). Fieka Nurul Arifa dan Ujjianto.⁴²

Penelitian ini mengkaji kebijakan program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan untuk pemenuhan kebutuhan guru profesional di Indonesia. Peneliti dalam artikel tersebut mengungkapkan perlunya perbaikan regulasi dan tata kelola kewenangan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru. Hal ini menjadi penting sebab kualitas Pendidikan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas pendidik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan dan analisis deskriptif.

⁴² Fieka Nurul Arifa and Ujjianto Singgih Prayitno, "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional Di Indonesia," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i1.1229>.

Persamaan dari penelitian kami terletak pada tema kebijakan program Pendidikan Profesi Guru. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian yang kami lakukan. Arifa dan Prayitno memfokuskan pembahasan pada analisis implikasi dari segi sosial penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan, sedangkan kajian analisis implikasi pada penelitian yang saya lakukan berfokus pada segi karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

2. Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru. (*LINGUA: Jurnal Bahasa dan Sastra*). Ismaini, Hanifa Zulfitri, dan Nadya Putri Setiawati.⁴³

Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan Pendidikan Profesi Guru mampu mengembangkan kompetensi profesionalisme guru. PPG didesain untuk menciptakan guru yang mampu beradaptasi dengan era Pendidikan 4.0 yang mengedepankan inovasi dan kreatifitas dalam pembelajaran. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa didalam pembelajaran PPG, guru diajarkan untuk menggunakan metode, model, pendekatan, dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik kelas yang diampu. Penelitian Hanifa dkk disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

⁴³ Zulfitri, Setiawati, and Ismaini, "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru."

Persamaan penelitian kami terletak pada tema pembahasan yang mengkaji program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai upaya peningkatan profesionalisme guru. Sedangkan perbedaannya terletak pada jangkauan pembahasan didalam penelitian. Hanifa dkk menyoroti kebijakan PPG dalam meningkatkan profesionalisme guru pada era Pendidikan 4.0 secara luas, sedangkan jangkauan pembahasan dalam penelitian yang saya lakukan adalah berfokus pada kebijakan Pendidikan Profesi Guru pada era Kurikulum Merdeka.

3. Membangun Sinergitas Pendidikan Akademik (S1) dan Pendidikan Profesi Guru (PPG). (*Gea: Jurnal Pendidikan Geografi*). Epon Ningrum.⁴⁴

Penelitian ini mengkaji tentang pentingnya membangun sinergi lembaga pendidikan profesi dengan perguruan tinggi. Sinergitas yang dimaksud bukanlah dalam bentuk nota kerjasama semata, melainkan sinergitas kurikulum dan materi pembelajaran didalam kedua sistem tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa struktur kurikulum dan isi materi dalam pendidikan akademik (S1) belum memiliki relevansi dan kontinuitas dengan pendidikan profesi. Linieritas yang dibangun didalam pendidikan profesi saat ini cenderung memaksakan kompetensi keilmuan yang didapat dari pendidikan akademik.

⁴⁴ Ningrum, "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)."

Persamaan penelitian yang kami lakukan terletak pada kajian sinergitas pendidikan profesi guru dengan kebijakan pendidikan lain yang sebidang. Akan tetapi perbedaannya adalah kajian sinergitas yang dilakukan oleh Epon Ningrum berfokus pada sinergitas PPG dengan Perguruan Tinggi, sedangkan kajian yang saya teliti adalah sinergitas PPG dengan implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran di kelas.

4. Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. *Skripsi*. Muhammad Aos Nuari / NIM 0706283866, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.⁴⁵

Skripsi milik Aos Nuari mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar yang ada di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Sertifikasi guru sebagaimana dimaksud oleh skripsi Aos Nuari adalah melalui program Pendidikan Profesi Guru. Kebijakan sertifikasi menurut penelitian Aos Nuari memberikan dampak yang positif bagi kegiatan belajar mengajar di Sekolah Dasar di wilayah Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Skripsi milik Aos Nuari menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan dan analisis deskriptif.

Persamaan penelitian saya dengan penelitian Aos Nuari adalah tema kebijakan publik di bidang Pendidikan, khususnya pada kebijakan

⁴⁵ Muhammad Aos Nuari, “Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat” (Universitas Indonesia, 2012).

Pendidikan Profesi Guru. Sedangkan perbedaan penelitian kami terletak pada kajian implikasi yang dihasilkan dari kebijakan PPG. Penelitian Aos Nuari meneliti secara umum dan luas terhadap pembelajaran yang ada di sekolah-sekolah dasar negeri wilayah kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Sedangkan penelitian saya memfokuskan pada implikasi PPG terhadap karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen, Kabupaten Demak.

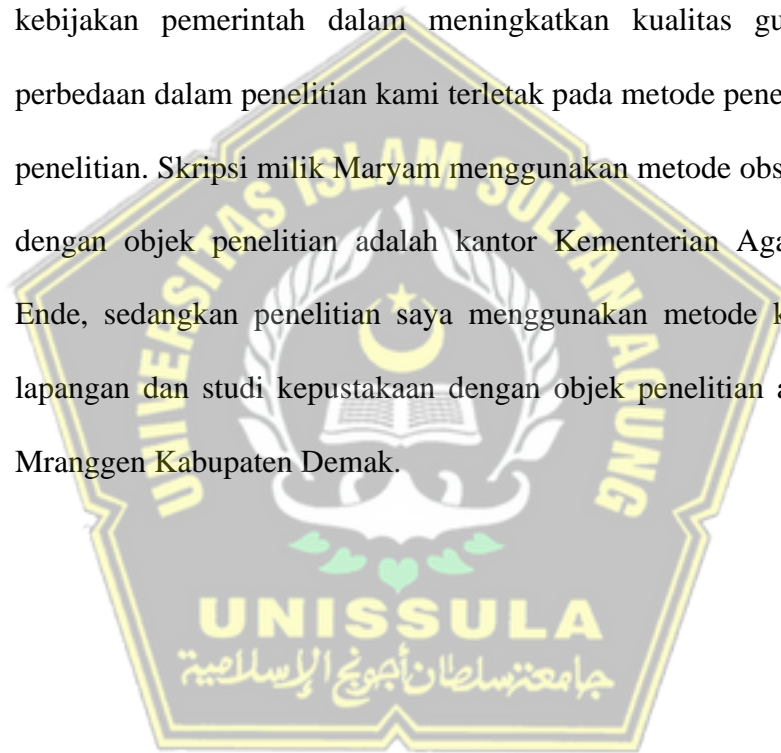
5. Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Se-Kota Ende (Studi Evaluasi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Tahun 2019-2020). *Skripsi*. Maryam Aulia Rachman / NIM 17422101, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.⁴⁶

Skripsi milik Maryam mengkaji kebijakan pemerintah melalui kantor Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas guru bidang studi Pendidikan Agama Islam. Kajian yang dilakukan oleh Maryam diambil dari sudut pandang pengambil kebijakan, bukan dari sudut pandang guru selaku pelaksana kebijakan. Maryam dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi lapangan. Berbeda dengan kebanyakan penelitian analisis kebijakan lainnya yang lebih condong

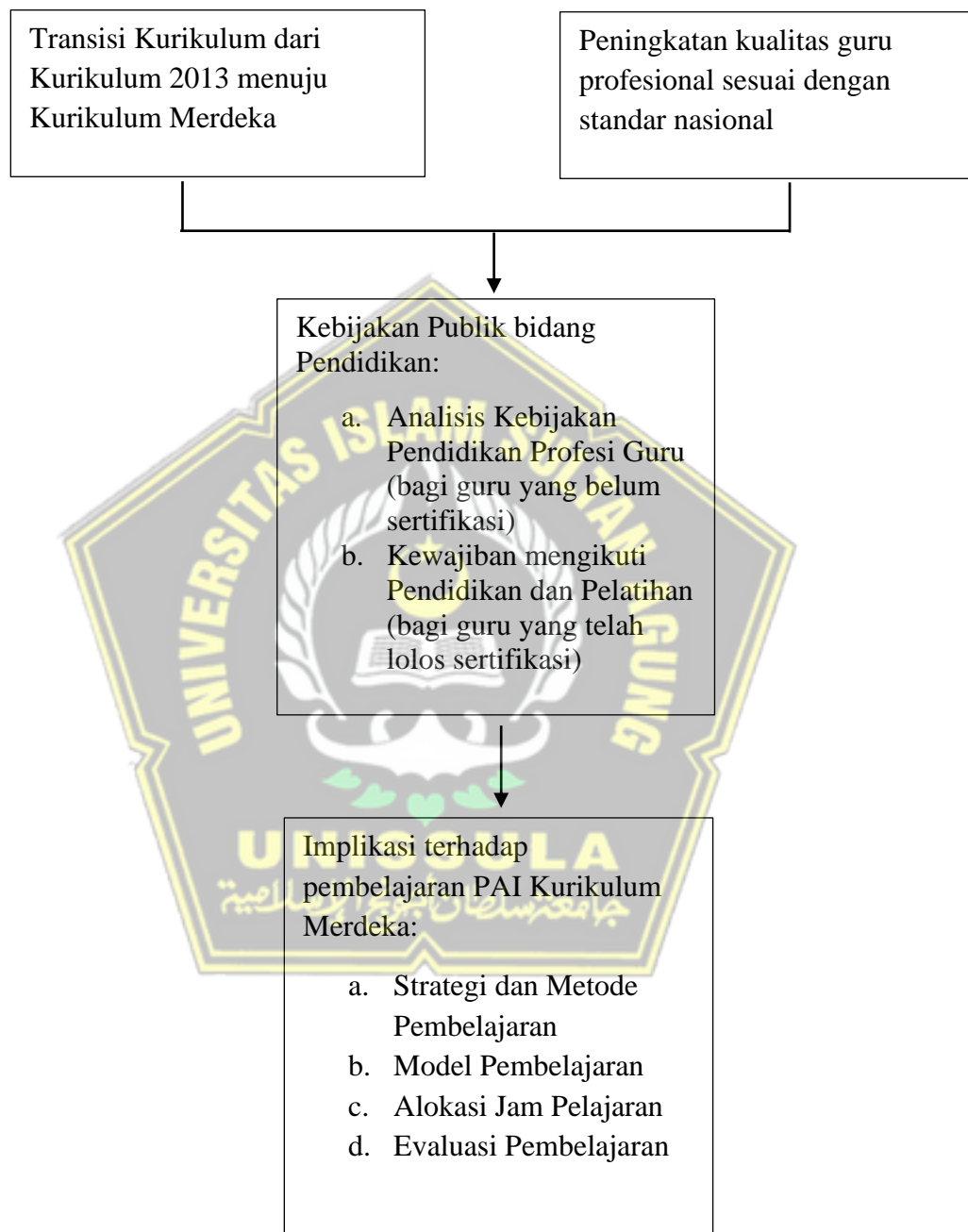
⁴⁶ Maryam Aulia Rachman, “Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Se-Kota Ende (Studi Evaluasi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Tahun 2019-2020)” (Universitas Islam Indonesia, 2020).

menggunakan metode studi kepustakaan atau kombinasi studi lapangan dengan studi kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh Maryam juga tidak secara jelas menyebutkan kualitas apa yang ditingkatkan dari kebijakan pemerintah melalui kantor Kementerian Agama di Kabupaten Ende.

Persamaan penelitian yang kami kaji adalah fokus penelitian mengenai kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru. Sedangkan perbedaan dalam penelitian kami terletak pada metode penelitian dan objek penelitian. Skripsi milik Maryam menggunakan metode observasi lapangan dengan objek penelitian adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, sedangkan penelitian saya menggunakan metode kombinasi studi lapangan dan studi kepustakaan dengan objek penelitian adalah MA NU Mranggen Kabupaten Demak.



C. Kerangka Teori



Masa transisi penerapan kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka membutuhkan sosialisasi lintas sektor dalam bidang

pendidikan. Sosialisasi dibutuhkan karena Kurikulum Merdeka dianggap membawa paradigma baru dalam pembelajaran, mulai dari peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui materi pembelajaran yang bersifat HOTS (*High Order Thinking Skill*), pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, dan pendidikan karakter yang dikemas dalam bentuk proyek bernama Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Selain kebutuhan mendesak akan tersedianya guru yang memahami Kurikulum Merdeka, negara juga membutuhkan ketersediaan guru profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional. Kebutuhan akan guru profesional dan berstandar nasional menjadi sangat mendesak sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional

Sebagai solusi atas kedua permasalahan tersebut, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Pendidikan Profesi Guru. Implikasi dari kebijakan ini tentunya berdampak pada karakteristik pembelajaran didalam kelas. Dampak yang ditimbulkan berpengaruh pada metode pembelajaran, evaluasi pembelajaran, alokasi waktu jam pelajaran, strategi dan model pembelajaran. Kebijakan Pendidikan profesi guru juga dimaksudkan untuk mengenalkan Kurikulum Merdeka kepada guru agar proses transisi kurikulum terintegrasi dengan baik.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah penjelasan operasional tentang karakteristik suatu masalah yang diteliti terhadap konsep-konsep yang sesuai dengan judul penelitian. Singkatnya, definisi konseptual adalah penjabaran makna dari konsep rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yakni:

1. Analisis Kebijakan

Analisis adalah kegiatan pemeriksaan atau penyelidikan suatu peristiwa berdasarkan data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis erat kaitannya dengan penelitian dan pengolahan data.⁴⁷ Adapun analisis kebijakan merupakan salah satu penerapan teknik analisis di bidang pemeriksaan kebijakan publik untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan yang telah diberlakukan.⁴⁸ Hasil dari analisis kebijakan dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi untuk para pembuat kebijakan dalam upaya pemecahan permasalahan publik.

Analisis kebijakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang

⁴⁷ Ace Suryadi and Henry Alexis Rudolf Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1933).

⁴⁸ Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*.

Pendidikan Profesi Guru (PPG). Analisis ini dibutuhkan karena implementasi kebijakan di bidang tersebut tampak belum memberikan implikasi yang signifikan terhadap karakteristik pembelajaran di dalam kelas, khususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri, mengingat Pendidikan Profesi Guru digadang-gadang menjadi program unggulan untuk mencetak guru berkualitas sesuai dengan standar nasional.

Dalam penelitian ini, analisis kebijakan didasarkan pada peraturan-peraturan yang mengatur teknis pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru. Tujuan dari analisis kebijakan dalam penelitian ini adalah mencari letak pasal-pasal strategis yang mengatur langkah integrasi Pendidikan Profesi Guru dengan paradigma pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka.

2. Kebijakan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Pendidikan Profesi Guru (atau biasa disebut dengan PPG) merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan strata-1 yang berfokus pada penyiapan guru profesional. Pendidikan profesi guru adalah salah satu bentuk kebijakan publik di bidang pendidikan.⁴⁹ Tujuan utama ditetapkannya kebijakan Pendidikan profesi guru adalah demi tercapainya ketersediaan guru yang profesional sesuai dengan

⁴⁹ Epon Ningrum, "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)," *Jurnal Geografi Gea* 12, no. 2 (March 28, 2016), <https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1783>.

standar minimum yang dibutuhkan. Keberadaan guru profesional sangatlah penting guna mencapai tujuan pendidikan nasional.⁵⁰

Amanat konstitusi mengenai Pendidikan Profesi Guru tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 42, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 11, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 17. Dalam pelaksanaannya, teknis penyelenggaraan dan materi pembelajaran dalam Pendidikan Profesi Guru diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Adapun Kementerian Agama diberikan kewenangan membantu menyelenggarakan Pendidikan Profesi Guru di bidang mata pelajaran keagamaan dan mata pelajaran yang linier.

3. Pembelajaran PAI

Pendidikan Agama Islam sebagai salah satu cabang mata pelajaran di bidang sosial keagamaan memegang peran kunci sebagai pengantar manusia untuk lebih mengenali agama yang dianutnya secara lebih mendalam. Pendidikan agama islam membawa misi mencerdaskan kehidupan manusia dengan ilmu dan amaliyyah yang sesuai dengan tuntunan syariah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵¹ Tolok ukur

⁵⁰ Arifa and Prayitno, "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional Di Indonesia."

⁵¹ Sulaiman, *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI): Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI*.

kesuksesan pendidikan agama islam tidak hanya dinilai dari hasil akhirnya saja, akan tetapi melibatkan proses dan perencanaan yang matang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Penelitian ini menyoroti perubahan yang terjadi dalam karakteristik pembelajaran PAI era Kurikulum Merdeka sebagai dampak adanya kebijakan Pendidikan Profesi Guru. Pembelajaran PAI yang sejak lama dikenal normatif dan mengedepankan doktrinasi, kini sudah mulai menggunakan pendekatan yang lebih terbuka, efektif, dan inovatif. Pendekatan yang lebih terbuka sebagaimana disebutkan tercermin dalam alokasi waktu jam pelajaran, media pembelajaran yang digunakan, model pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, serta pelibatan program Penguatan Profil Pelajar Pancasila didalam kokurikuler mata pelajaran PAI.

4. Kurikulum Merdeka

Pendidikan sebagai usaha sadar mencerdaskan kehidupan manusia membutuhkan kegiatan pembelajaran sebagai sarana mentransfer ilmu. Interaksi yang dibentuk secara sengaja dan terstruktur dalam pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan manusia.⁵² Penyusunan perencanaan pembelajaran

⁵² Muna Hatija, Lubis Lubis, and Ratna Rahim, "Teori-Teori Belajar Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran PAI," *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 2023.

membutuhkan pedoman agar proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Peran kurikulum sebagai pedoman umum dalam penetapan tujuan pembelajaran adalah kunci utama sebelum penyusunan perencanaan pembelajaran. Kurikulum mencakup seluruh pedoman tertulis yang menjadi acuan standar proses pembelajaran.

Kurikulum yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2022 adalah Kurikulum Merdeka. Menurut penelitian ini, Kurikulum Merdeka membawa nuansa baru dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek yang disebut sebagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik. Implementasi kurikulum merdeka dilakukan secara bertahap pada tiap jenjang pendidikan dan seluruh mata pelajaran, termasuk diantaranya adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Dengan adanya perubahan kurikulum, maka dibutuhkan adanya perubahan karakteristik pembelajaran dari pembelajaran PAI Kurikulum 2013 menuju pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dan mempelajari sumber-sumber literatur tanpa memerlukan riset lapangan. Pengumpulan data pada penelitian

kepastakaan dilakukan dengan cara mencari dan menkontruksikan berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan riset terdahulu, dan lain sejenisnya. Bahan pustaka yang telah didapat kemudian dianalisis secara kritis untuk mengambil proposisi dan gagasan didalamnya.⁵³ Zed menjelaskan ada empat tahapan dalam penelitian kepastakaan, yaitu: menyiapkan alat yang digunakan untuk mencari sumber pustaka, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu, dan yang terakhir adalah membaca serta mencatat bahan penelitian.⁵⁴

Selanjutnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data empiris yang dibutuhkan dalam penelitian melalui interaksi dengan objek penelitian.⁵⁵ Peneliti kemudian membuat simpulan hasil penelitian berdasarkan data empiris yang didapatkan dari hasil interaksi dengan objek penelitian.

Penggunaan jenis penelitian kombinasi ini mempertimbangkan kebutuhan objek yang diteliti. Pertimbangan pertama adalah analisis kebijakan Pendidikan profesi guru hanya bisa didapat melalui penelitian kepastakaan. Pertimbangan yang kedua, penelitian kepastakaan diperlukan sebagai satu tahap tersendiri untuk pendahuluan lebih mendetail dalam memahami fenomena yang tengah berkembang. Pertimbangan ketiga, studi lapangan mengenai implikasi

⁵³ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008).

⁵⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*, 5th ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

kebijakan Pendidikan profesi guru pada pembelajaran Pendidikan agama islam di MA NU Mranggen membutuhkan observasi lapangan dan wawancara langsung dengan narasumber.

Adapun pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang memfokuskan analisisnya pada proses penyimpulan hasil telaah terhadap temuan fenomena yang didapat dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁶ Analisis deskriptif digunakan untuk mengungkapkan hasil penelitian menggunakan kata-kata secara sistematis dan metodologis sesuai dengan fakta yang didapatkan selama penelitian.

C. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian kepustakaan dalam skripsi ini berlokasi di Perpustakaan Daerah Kota Semarang, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung.

Sedangkan tempat penelitian lapangan berlokasi di Madrasah Aliyah Nahdhatul Ulama Mranggen yang beralamat di Jalan Pasar Hewan No. 4 RT 1 RW 2 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

⁵⁶ Lexy J. Moleong and Tjun Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Remadja Karya, 1989).

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian kepustakaan dimulai sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai 10 Februari 2024. Sedangkan waktu penelitian lapangan dimulai sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai 30 April 2024 di Madrasah Aliyyah Nahdhatul Ulama Mranggen Kabupaten Demak.

No.	Kegiatan	Jadwal																											
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1.	Observasi Sumber Data	■												■															
2.	Reduksi Data																												
3.	Analisis Data																												
4.	Penyusunan Skripsi																												
5.	Bimbingan																												
6.	Revisi																												
7.	Sidang Hasil																												
8.	Revisi Pasca Sidang																												
9.	Skripsi Selesai																												

Tabel 8 Agenda Penelitian

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait.⁵⁷ Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung kepada peneliti.⁵⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kebijakan Pendidikan profesi guru dan wawancara langsung kepada guru pengampu mata pelajaran kategori Pendidikan Agama Islam di MA NU Mranggen.

Kebijakan tentang Pendidikan Profesi Guru yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

⁵⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*.

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2018).

- c) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
- d) Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
- e) Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.
- f) Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama

Sedangkan wawancara dan observasi langsung dilakukan beberapa kali selama periode penelitian berlangsung. Adapun informan yang menjadi narasumber dalam wawancara antara lain:

- a) Dwi Sukmahroni, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum.
- b) Sodiq, guru mata pelajaran Aqidah Akhlak.
- c) Muhson Rahmat, guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.
- d) Enny Rokhmawati, guru mata pelajaran Fiqih.
- e) Muhammad Catur Rafi, peserta didik kelas IX MIA 2.
- f) Audia Rachmi Pratiwi, peserta didik kelas IX MIA 2.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan informasi tidak langsung kepada peneliti.⁵⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder berupa peraturan teknis PPG, artikel jurnal, profil sekolah, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau bisa juga disebut dengan metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti.⁶⁰ Teknik ini membutuhkan langkah yang strategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid sesuai dengan fakta di lapangan. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik untuk menyelidiki perilaku nonverbal. Observasi tidak hanya terbatas pada orang, melainkan juga dapat dilakukan terhadap objek-objek alam yang lain.⁶¹ Melalui teknik pengumpulan data observasi, peneliti dapat mengamati perilaku secara intens dan mengetahui makna dari perilaku tersebut.

⁵⁹ Sugiyono.

⁶⁰ Sugiyono.

⁶¹ M.Pd. Prof. Dr. A.M. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016).

Adapun observasi pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, observasi kebijakan publik bidang pendidikan yang mengatur mengenai Pendidikan Profesi Guru. Bagian kedua, observasi penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam di MA NU Mranggen.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan data melalui interaksi secara verbal antara peneliti dengan narasumber.⁶² Wawancara merupakan salah satu bentuk komunikasi dua arah. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan metode wawancara terpimpin. Menurut Arikunto, wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat.⁶³

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada guru-guru mata pelajaran bidang studi Pendidikan Agama Islam yang telah lulus dari Pendidikan Profesi Guru serta dua orang peserta didik kelas XI MIA 2 MA NU Mranggen.

⁶² Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*.

⁶³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Psikologi Edisi II*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk literatur tertulis maupun literatur bergambar yang berupa keterangan pendukung proses penelitian.⁶⁴ Hasil penelitian observasi dan wawancara akan lebih dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi yang kredibel.

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat bukti penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti. Hasil dokumentasi berupa tabel, foto, dan literatur tertulis lainnya dan telah dilampirkan di bagian lampiran.

F. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah proses pengolahan data ke dalam kategori, pola, atau satuan tertentu sehingga dapat dirumuskan simpulan awal berdasarkan pola data yang telah disusun.⁶⁵ Sedangkan menurut Sugiyono, analisis data adalah proses penyusunan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi secara sistematis dengan pola atau urutan tertentu sehingga mampu dipahami oleh peneliti sendiri dan orang lain.⁶⁶

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, Supardi, and Suhardjono, *Penelitian Tindakan Kelas*, Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

⁶⁵ Moleong and Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*.

Teknik analisis data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan ketika pengumpulan data telah selesai. Penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman dalam menganalisis data yang didapat. Adapun model interaktif yang digunakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan informasi di lapangan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilahan, penyortiran data, dan memfokuskan pada data penting yang relevan. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan membuat pola sesuai klasifikasi data sehingga mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁶⁷

Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah data hasil studi kepustakaan tentang kebijakan Pendidikan Profesi Guru dan data hasil observasi serta wawancara di MA NU Mranggen.

⁶⁷ Moleong and Surjaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif yang mengungkapkan analisis dampak kebijakan Pendidikan Profesi Guru terhadap karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen.

4. Pengambilan simpulan

Pengambilan kesimpulan dilakukan untuk menyederhanakan data dan informasi yang diperoleh secara ringkas dan mudah dipahami. Dalam teknik analisis data model interaktif Miles and Huberman, pengambilan kesimpulan ini diklarifikasi dan diverifikasi selama penelitian berlangsung.

G. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan teknik pemeriksaan derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).⁶⁸ Bachri BS memiliki pandangan yang berbeda, ia mengutip

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*.

pendapat Norman K. Denkin yang meyakinkan uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dapat diraih menggunakan Triangulasi.⁶⁹

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai alat uji keabsahan data. Denkin sebagaimana dikutip oleh Bachri mendefinisikan triangulasi adalah kombinasi metode yang dipakai untuk mengkaji rangkaian fenomena dari berbagai prespektif dan sudut pandang.⁷⁰ Triangulasi terbagi menjadi empat metode, yaitu: triangulasi teknik, triangulasi waktu, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Penelitian ini menggunakan 3 metode triangulasi:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah langkah pemeriksaan kembali sumber-sumber data yang telah didapatkan. Prinsip triangulasi sumber adalah semakin banyak sumber yang didapatkan dan memiliki kesamaan, akan semakin akurat pula data yang akan diperoleh.⁷¹

Penelitian ini menggunakan sumber berupa kebijakan yang mengatur pendidikan profesi guru dan para narasumber yang bersedia diwawancarai. Selanjutnya data-data dari sumber tersebut

⁶⁹ Azwar, *Metode Penelitian Psikologi Edisi II*.

⁷⁰ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Teknologi Pendidikan* 10 (2010).

⁷¹ Andarusni Alfansyur and Mariyani, "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis* 5, no. 2 (2020).

dianalisa untuk memperoleh kesimpulan dan diminta kesepakatan dengan sumber tersebut.

Sebagai contoh, pernyataan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak akan disandingkan dengan pernyataan hasil wawancara dengan peserta didik kelas XI MIA 2 terkait pembelajaran didalam kelas. Apabila ditemukan perbedaan hasil pernyataan, maka peneliti akan melakukan *review* ulang kepada narasumber untuk mengambil kesimpulan akhir hasil wawancara.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah langkah pemeriksaan kembali sumber-sumber dengan teknik yang berbeda, yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara.⁷² Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dengan melakukan perbandingan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Apabila diketahui data yang diperoleh terdapat sebuah perbedaan, maka peneliti akan melaksanakan diskusi dengan narasumber.

Sebagai contoh, hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada mata pelajaran Fiqih akan dicocokkan dengan hasil wawancara dengan narasumber selaku guru mata pelajaran. Apabila

⁷² Dedi Susanto, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.

ditemukan perbedaan dari keduanya, peneliti akan berdiskusi dengan narasumber dan melakukan observasi ulang untuk memperoleh data tentang pembelajaran Fiqih yang lebih akurat.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah langkah pemeriksaan kembali sumber-sumber secara periodik dengan teknik yang sama atau berbeda dalam waktu yang berbeda-beda. Data yang diperoleh kemudian dikomparasikan berdasarkan waktu pengambilan sumber data.⁷³

Penelitian ini menggunakan triangulasi waktu dengan melakukan komparasi hasil observasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MA NU Mranggen yang dilakukan dalam waktu berbeda. Apabila terdapat perbedaan hasil observasi maka peneliti melakukan diskusi dengan narasumber.

Sebagai contoh, peneliti menggunakan teknik triangulasi ini untuk memeriksa penggunaan media belajar berbasis audio visual pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Ditemukan hasil bahwa pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam aktif menggunakan media pembelajaran sebagai alat belajar yang mudah dipahami oleh peserta didik.

⁷³ Susanto, Risnita, and Jailani.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan PPG yang Terintegrasi dengan Implementasi Kurikulum Merdeka

Pendidikan Profesi Guru adalah program yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka mempersiapkan kompetensi guru agar sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pendidikan Profesi Guru termasuk kedalam kategori Pendidikan Tinggi karena program ini dikhususkan bagi individu yang telah memiliki ijazah S-1 Kependidikan dan D-IV non kependidikan. Dalam penyelenggaraannya, Pendidikan Profesi Guru membutuhkan kebijakan yang mengatur teknis dan alur pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia membagi program Pendidikan Profesi Guru kedalam dua jenis klasifikasi yang berbeda: Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) dan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajabatan). Keduanya memiliki sasaran, alur pendaftaran, dan skema pembelajaran yang berbeda. Pemisahan jenis Pendidikan Profesi Guru ini dilakukan guna mempercepat proses sertifikasi secara nasional untuk memenuhi kebutuhan guru profesional didalam negeri. Meskipun memiliki beberapa perbedaan, tetapi setiap lulusan PPG berhak mendapatkan sertifikat profesi keguruan yang sama.

Berikut ini disajikan tabel perbedaan antara PPG Dalam Jabatan dengan

PPG Prajabatan:

Aspek	Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan	Pendidikan Profesi Guru Prajabatan
Sasaran Program	Terbagi menjadi empat kategori: <ol style="list-style-type: none"> a. Kategori I: Guru yang diangkat sebelum akhir tahun 2015. b. Kategori II: Guru yang diangkat mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2025. c. Kategori Guru Penggerak d. Kategori Eks PLPG 	Lulusan S-1/D-IV Kependidikan maupun non kependidikan yang belum terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud atau Simpatika Kemenag
Perkuliahan	1 semester (3 bulan) dengan Rekognisi Pembelajaran Lampau sebanyak 24 SKS dan beban kuliah 12 SKS	2 semester (1 tahun) dengan beban kuliah 38 SKS. Terbagi kedalam 32 SKS MK Inti, 4 SKS MK Selektif, 2 SKS MK Elektif
Pembiayaan	Gratis. Dibiayai oleh negara melalui LPTK	Mandiri

Alur Tahapan Seleksi	Penetapan kuota nasional, Seleksi Administrasi, Verifikasi dan Validasi Berkas, Seleksi Akademik	Seleksi Administrasi, Seleksi Substantif, Seleksi Wawancara
Struktur Kurikulum	<p>a. Pendalaman Materi (5 SKS) Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/<i>high order thinking skills</i>.</p> <p>b. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (3 SKS) Desain pembelajaran inovatif dan interaktif.</p> <p>c. PPL (4 SKS) Praktik pembelajaran inovatif di lembaga pendidikan sesuai dengan mata</p>	<p>Pembelajaran dalam PPG Prajabatan terbagi menjadi 2 (dua) semester:</p> <p>1) Semester I</p> <p>a) Perkuliahan berorientasi praktik (12 SKS)</p> <p>b) PPL di sekolah (6 SKS)</p> <p>Pada pelaksanaan PPL di sekolah, mahasiswa PPG Prajabatan melakukan pengamatan siswa (<i>Observing Teaching</i>) dan belajar mengajar mata pelajaran (<i>Assisting Teaching</i>).</p> <p>2) Semester II</p> <p>a) Perkuliahan berorientasi praktik (8 SKS)</p>

	pelajaran yang diampu.	<p>b) Proyek Kepemimpinan di Lingkungan Masyarakat (2 SKS)</p> <p>c) PPL di sekolah (8 SKS)</p> <p>Pada pelaksanaan PPL di sekolah, mahasiswa PPG Prajabatan melakukan Proyek Inovasi Pengajaran (<i>Collaboration Teaching</i>) dan Proyek Studi Kasus Siswa Bermasalah (<i>Leading Teaching</i>).</p>
Struktur Pembelajaran	Perkuliahan Pendalaman Materi, Seminar/Lokakarya, Praktik Lapangan	Orientasi, Perkuliahan berorientasi praktek dan proyek, Uji Kompetensi Mahasiswa PPG

Tabel 9 Perbedaan aspek dalam Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dengan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

Meskipun dalam beberapa aspek terdapat perbedaan yang mencolok, tetapi tujuan utama diselenggarakannya PPG Daljab dan PPG Prajabatan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti RI) Nomor 55 Tahun 2017 Pasal 4 ayat 3, yaitu menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang nasionalis dan memiliki

wawasan global sesuai dengan kebutuhan nasional, lokal, dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.⁷⁴

Selain klasifikasi PPG sesuai dengan jenisnya, tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru pada era Kurikulum Merdeka juga terbagi menjadi wewenang milik dua kementerian, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Pasal 21 dan Pasal 22 dimana kedua pasal itu menyebutkan bahwa standar pendidikan bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Status kewenangan utama penyelenggaraan PPG tetap berada dibawah Kemendikbudristek, sedangkan Kemenag diberi kewenangan untuk mengembangkan ciri khas keagamaan. Dalam kondisi tertentu dimana Kemenag membutuhkan kebijakan yang spesifik, maka Kemenag diperbolehkan mengeluarkan peraturan diskresi dengan syarat tetap terintegrasi dengan peraturan Kemendikbudristek selaku pemegang kewenangan utama. Adapun regulasi yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan PPG pada kedua kementerian itu dibedakan antara lain:

⁷⁴ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru* (Jakarta: JDIIH Kemenristekdikti RI, 2017).

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

a. Kebijakan Utama (umum)

Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.

b. Kebijakan PPG Dalam Jabatan

Permendikbudristek Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan.

c. Kebijakan PPG Prajabatan

Peraturan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3830/B/HK.03.01/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

2. Kementerian Agama

a. Kebijakan Utama (umum)

Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama.

b. Kebijakan PPG Dalam Jabatan

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 115 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2023.

c. Kebijakan PPG Prajabatan

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6328 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama.

Adapun kurikulum Pendidikan Profesi Guru tahun 2023 diintegrasikan dengan Kurikulum Merdeka yang diimplementasikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini diatur didalam Buku Panduan PPG Dalam Jabatan dan Prajabatan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Tahun 2022.

1. Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan

Pembelajaran PPG Daljab terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yaitu: Orientasi tentang guru masa depan dan paradigma pembelajaran baru dalam Kurikulum Merdeka, belajar mandiri dengan prinsip *self-regulated learning*, pembelajaran inti yang terdiri dari 9 langkah belajar, dan ditutup dengan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG berupa uji pengetahuan dan uji kinerja.⁷⁵

Sembilan langkah belajar dalam pembelajaran inti PPG Dalam Jabatan antara lain: identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah, eksplorasi alternatif solusi, penentuan

⁷⁵ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Buku Pintar Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat PPG Kemendikbudristek RI, 2023).

solusi, pembuatan rencana aksi, pembuatan rencana evaluasi, pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi, terakhir ditutup dengan refleksi hasil akhir berupa rencana tindak lanjut. Apabila dicermati, sembilan langkah belajar ini mengadaptasi dari proses penelitian tindakan kelas.

Penilaian akhir program PPG Daljab terdiri dari tiga unsur, yaitu: Uji komprehensif berupa materi teoritis yang dipelajari dalam perkuliahan, Penilaian praktik pembelajaran inovatif, dan UKM PPG.

2. Pendidikan Profesi Guru Prajabatan

Pembelajaran PPG Prajabatan terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yaitu: Orientasi berupa pengenalan kurikulum PPG Prajabatan dan pengenalan paradigma pembelajaran baru dalam Kurikulum Merdeka, kegiatan perkuliahan reguler berbasis praktik yang terbagi menjadi 2 semester, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) satu kali di tiap semester, dan diakhiri dengan Uji Kompetensi Mahasiswa PPG.

Proses pembelajaran dalam PPG Pajabatan dilaksanakan secara *hybrid* dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Pembelajaran didalam PPG Prajabatan dirancang secara relevan dan terintegrasi dengan Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka serta mengedepankan prinsip pembelajaran inkuiri dan kebiasaan berefleksi. Kemudian, pelaksanaan PPL pada program PPG Prajabatan dibedakan menjadi PPL Terbimbing (semester 1) dan PPL Mandiri (semester 2). Pelaksanaan PPL didalam PPG Prajabatan bertujuan untuk

mengenalkan para peserta PPG terhadap kurikulum merdeka secara lebih intens.

Mata kuliah didalam kurikulum Pendidikan Profesi Guru Prajabatan terbagi menjadi tiga jenis, yakni:⁷⁶

a. Mata Kuliah Inti (32 SKS)

Mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa dan harus memenuhi standar nilai minimal sebagai bagian dari syarat kelulusan program PPG Prajabatan.

b. Mata Kuliah Selektif (4 SKS)

Mata kuliah pilihan yang ditetapkan secara nasional kemudian disaring oleh LPTK untuk disediakan kepada mahasiswa PPG Prajabatan sesuai dengan linieritas program studi yang diambil.

c. Mata Kuliah Elektif (2 SKS)

Mata kuliah yang dikembangkan secara mandiri oleh LPTK dan harus diambil oleh mahasiswa PPG Prajabatan.

Tidak ada perbedaan secara signifikan didalam struktur kurikulum antara PPG Kemendikbudristek dengan PPG Kemenag. Perbedaan yang banyak ditemukan justru ada didalam struktur pembelajaran dan materi pembelajaran PPG Kemenag sebagai hasil dari pengembangan ciri khas keagamaan.

⁷⁶ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *Buku Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat PPG Kemendikbudristek RI, 2023).

Perbedaan yang terdapat didalam PPG Kemenag dengan PPG Kemendikbudristek disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Aspek	PPG Kemendikbudristek	PPG Kemenag
Tahap Awal Pembelajaran	Diawali dengan Orientasi	Diawali dengan Orientasi dan Matrikulasi
Kompetensi Guru yang Ingin Dicapai	Pedagogik, Profesional, Kepribadian, dan Sosial.	Pedagogik, Profesional, Kepribadian, Sosial, dan Kepemimpinan
Orientasi Paradigma Pembelajaran Baru Kurikulum Merdeka	a. Pengembangan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar berorientasi HOTS, b. Pendekatan belajar <i>student-oriented</i> , c. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	a. Pengembangan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar berorientasi HOTS, b. Pendekatan belajar <i>student-oriented</i> , c. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila d. Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin
Strategi Pelaksanaan PPG	PPG Tidak Berasrama	PPG Tidak Berasrama, PPG Berasrama (khusus PPG Prajabatan)

Tabel 10 Perbedaan PPG Kemendikbudristek dengan PPG Kemenag

B. Karakteristik Pembelajaran PAI di MA NU Mranggen Sebelum Implementasi Kebijakan PPG

Dwi Sukmahroni selaku wakil kepala madrasah bidang kurikulum mengatakan bahwasannya pembelajaran PAI di MA NU Mranggen masih menggunakan Kurikulum 2013 sebelum adanya implementasi kebijakan Pendidikan Profesi Guru. Implementasi Kurikulum Merdeka pada waktu itu belum dapat diterapkan dalam pembelajaran PAI karena menunggu ketersediaan guru bidang studi PAI yang telah lulus PPG dan memahami struktur Kurikulum Merdeka dengan baik.⁷⁷

Karakteristik pembelajaran PAI didalam Kurikulum 2013 terikat dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) sebagai komponen pembelajaran. Menurut Muhson Rahmat, penggunaan KI dan KD membelenggu guru sehingga guru tidak dapat mengaktualisasikan gaya mengajar dan model pembelajaran yang cocok sesuai karakteristik peserta didik di kelas. Muhson Rahmat berpendapat, susunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada Kurikulum 2013 sangatlah rumit dan guru cenderung mengajar tanpa memerhatikan langkah-langkah mengajar didalam RPP.⁷⁸

Pendapat berbeda disampaikan oleh Enny Rokhmawati. Enny selaku guru Fiqih justru memiliki pendapat bahwa Kurikulum 2013 memudahkan guru PAI dalam meningkatkan kapasitas nalar kritis peserta didik melalui pendekatan

⁷⁷ Wawancara dengan Dwi Sukmahroni, S.Pd. oleh peneliti, (20 Mei 2024) pukul 08.12 WIB.

⁷⁸ Wawancara dengan H. Muhson Rahmat, S.Pd. oleh peneliti, (20 Mei 2024) pukul 08.55 WIB.

saintifik. Ada lima fase pendekatan saintifik didalam pembelajaran PAI yang menjadi identitas Kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanyakan, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan.⁷⁹ Konsep pendekatan saintifik khas Kurikulum 2013 ini akan berjalan optimal apabila guru pengampu mata pelajaran memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai.

Adapun guru mata pelajaran Aqidah Akhlak, Shodiq, mengungkapkan pembelajaran PAI menggunakan Kurikulum 2013 secara teoritis memang bertujuan untuk meningkatkan penalaran kritis peserta didik melalui pendekatan saintifik. Namun pada kenyataannya di lapangan, implementasi teori tersebut sulit untuk diwujudkan mengingat rendahnya motivasi belajar peserta didik di MA NU Mranggen.⁸⁰ Shodiq menilai rendahnya motivasi belajar para peserta didik di MA NU Mranggen dilatar belakangi oleh minimnya dukungan orang tua dan kondisi ekonomi keluarga yang masuk dalam kategori menengah kebawah.

Dari ketiga mata pelajaran bidang studi PAI yang diobservasi, semuanya menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan selama Kurikulum 2013 menggunakan metode ceramah, karena pendekatan yang digunakan masih menggunakan pendekatan *teacher-oriented*. Terdapat 2 (dua) alasan mengapa

⁷⁹ Wawancara dengan Enny Rokhmawati, S.H.I. oleh peneliti, (20 Mei 2024) pukul 10.26 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Shodiq, S.Ag. oleh peneliti, (20 Mei 2024) pukul 13.04 WIB.

metode ceramah dipilih oleh para guru PAI. Alasan pertama, keterbatasan guru dalam mengembangkan RPP sehingga fleksibilitas model pembelajaran pun tidak terakomodir. RPP dalam Kurikulum 2013 memang mencantumkan KI dan KD secara detail, akan tetapi hal tersebut membuat guru merasa terkekang dan tidak dapat mengembangkan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Alasan kedua, minimnya tingkat kemandirian peserta didik dalam belajar. Para peserta didik di MA NU Mranggen tidak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar, sehingga hal ini cukup menyulitkan guru dalam membangun kemandirian belajar para peserta didik.

Dwi Sukmahroni menilai setiap kurikulum memiliki karakteristik dan ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi, pada era teknologi seperti saat ini guru membutuhkan kompetensi merancang perangkat pembelajaran berbasis TPACK (*Technological Pedagogical and Content Knowledge*). Dwi mengakui bahwa MA NU Mranggen yang banyak diisi oleh guru sepuh memiliki keterbatasan pada aspek penguasaan teknologi. Oleh karena itu, beliau mendorong para guru di lingkungan MA NU Mranggen untuk mengembangkan potensi dan kompetensi dengan cara berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan diklat seperti yang diadakan oleh MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). Ilmu yang didapat dari diklat dapat diterapkan kedalam kegiatan belajar mengajar sehingga bermanfaat bagi kemajuan madrasah.

C. Implikasi Kebijakan PPG terhadap Pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen

Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan guna mengembangkan kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan. Peneliti melakukan observasi lapangan di MA NU Mranggen untuk melihat lebih dekat proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru-guru lulusan PPG dan telah memiliki sertifikat pendidik yang diakui oleh negara. Adapun mata pelajaran yang menjadi objek observasi yaitu mata pelajaran bidang studi PAI (Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam). Mata pelajaran Qur'an Hadits tidak menjadi objek observasi karena guru pengampu tidak berkenan memberikan izin kepada peneliti. Penelitian dilakukan di Kelas XI MIA 2 Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Mranggen.

Indikator dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu indikator kemampuan guru dalam mengelola kelas sesuai dengan kompetensi dasar guru dan indikator karakteristik pembelajaran didalam kelas sesuai dengan panduan Kurikulum Merdeka. Indikator kemampuan guru berdasarkan kompetensi antara lain: Pengelolaan pembelajaran (pedagogik), Penguasaan keilmuan (professional), Sikap dan kepribadian guru (kepribadian), Interaksi sosial dengan peserta didik maupun sesama guru (sosial), Kepemimpinan di organisasi sekolah (kepemimpinan). Sedangkan indikator pembelajaran PAI yang berbasis kurikulum merdeka dilihat dari penggunaan modul ajar, pemahaman guru terhadap konsep mata pelajaran PAI Kurikulum Merdeka, pendekatan belajar

yang bersifat *student-oriented*, evaluasi belajar berorientasi HOTS, pelaksanaan P5 dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin.

Peneliti menyusun hasil observasi dan wawancara secara urut berdasarkan mata pelajaran bidang studi PAI yang diteliti. Catatan khusus untuk mata pelajaran Qur'an Hadits tidak peneliti cantumkan didalam laporan penelitian ini karena guru pengampu menolak untuk diwawancarai sehingga dikhawatirkan dapat mengurangi validitas data yang didapatkan. Hasil observasi dan wawancara ialah sebagai berikut:

1. Aqidah Akhlak

Mata pelajaran Aqidah Akhlak kelas XI MIA 2 diampu oleh Shodiq, S.Ag. Beliau merupakan lulusan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2013 di lingkungan Kementerian Agama. Beliau menceritakan bahwasannya PPG pada masa itu hanya memfokuskan pada pembinaan metode mengajar guru dan belum ada model pembelajaran berbasis proyek seperti saat ini. Pembelajaran PPG pada masa itu sistemnya seperti diklat, dimana para peserta PPG dikumpulkan di satu tempat selama 10 hari untuk menyelesaikan materi belajar PPG Dalam Jabatan. Adapun penguasaan konsep pembelajaran Kurikulum Merdeka beliau dapatkan setelah mengikuti In-House Training yang diadakan oleh MA NU Mranggen pada tahun 2023.

Observasi pembelajaran Aqidah Akhlak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu antara bulan Maret hingga April. Hasil observasi yang peneliti lakukan selama kegiatan belajar mengajar di kelas IX MIA 2, pembelajaran aqidah akhlak menggunakan metode ceramah dan diskusi terpimpin. Shodiq selaku guru pengampu tampak menguasai materi pelajaran yang diberikan serta pengelolaan pembelajaran yang terstruktur dan runut sesuai dengan modul ajar, mulai dari pembukaan hingga sesi penutup. Adapun kepribadian yang beliau tunjukkan didepan kelas mengedepankan sikap tegas dan lugas. Hasil wawancara dengan Audia dan Rafi juga menyimpulkan bahwa Shodiq merupakan guru yang disegani oleh para muridnya karena memiliki sikap yang tegas, tidak jarang beliau mendisiplinkan para peserta didiknya yang bersikap acuh selama pelajaran berlangsung.⁸¹

Mengenai konsep pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka, tampaknya Shodiq memiliki alasan mengapa tidak menerapkan pembelajaran yang bersifat *student-oriented*. Dalam salah satu wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Shodiq pernah mengungkapkan:

“Ada satu sisi kurikulum merdeka yang saya suka, yaitu tentang Profil Pelajar Pancasila dan kalau di madrasah ada tambahannya yaitu profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Akan tetapi, untuk pembelajaran yang sifatnya tergantung siswa (artinya pendekatan student-oriented) menurut saya susah untuk diterapkan disini mas. Anak-anak disini

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Catur Rafi dan Audia Rachma Pertiwi oleh peneliti, (4 Maret 2024) Pukul 09.40 WIB.

semangat belajarnya rendah dan tidak memiliki niat berjuang dalam belajar. Kalau saya pakai pendekatan belajar seperti yang masnya sampaikan, ya kelasnya nggak bakal jalan. Bubar mas.”⁸²

Meskipun beliau tidak menggunakan pendekatan belajar yang sifatnya *student-oriented*, hasil observasi yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa beliau tetap berusaha menyampaikan materi pelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami dan disisipkan candaan khas anak muda untuk memancing antusiasme semangat belajar peserta didik di kelas XI MIA 2.

Shodiq juga menjelaskan, evaluasi hasil belajar yang beliau lakukan sudah mulai menggunakan soal-soal yang masuk kedalam kategori HOTS (*High Order Thinking Skills*). Beliau mengungkapkan bahwa penggunaan soal ujian kategori HOTS disusun oleh MGMP Aqidah Akhlak tingkat kabupaten dan mulai digunakan ketika Penilaian Akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2023/2024 lalu.

Selama peneliti melakukan observasi di MA NU Mranggen, peneliti menemukan fakta bahwa Shodiq seringkali berdiskusi dengan guru yang lebih muda membahas materi pelajaran yang akan diajarkan sebelum masuk kedalam kelas. Selain itu, Shodiq juga beberapa kali menjadi imam sholat dzuhur berjamaah di masjid madrasah. Hal ini mengindikasikan bahwa beliau memiliki kompetensi kepemimpinan dan kompetensi sosial yang cukup baik sebagai seorang guru.

⁸² Wawancara dengan Shodiq, S.Pd. oleh peneliti, (6 Maret 2024), pukul 10.25 WIB.

2. Fiqih

Mata pelajaran Fiqih kelas XI MIA 2 diampu oleh Enny Rokhmawati, S.Pd., beliau merupakan lulusan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan tahun 2017 di bawah naungan Kementerian Agama. Selain aktif menjadi guru mata pelajaran Fiqih, beliau juga mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XII dan menjabat sebagai kepala perpustakaan MA NU Mranggen. Enny menceritakan bahwa sistem PPG pada tahun 2017 sudah menggunakan pembelajaran berbasis proyek dan melalui proses PPL sebelum melaksanakan ujian akhir.

Sebagai seorang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik, Enny memiliki tanggungjawab moral untuk membimbing guru-guru mata pelajaran fiqih lainnya yang lebih muda. Seperti yang beliau ungkapkan dalam salah satu wawancara dengan peneliti:

“Jujur saya memiliki beban moral tersendiri mas ketika saya mendapatkan sertifikasi (sertifikat pendidik). Saya merasa ada tuntutan buat bimbing guru lain yang lebih muda dari saya, apalagi ketika kemarin sebelum IHT (In-House Training) saya sama Pak Muhson itu satu-satunya guru yang udah dapet materi tentang Kurikulum Merdeka. Pak Muhson dapet dari PPG Daljab karena beliau kan ikut yang edisi terbaru, kalua saya dapet dari diklat rutin yang saya ikuti di kemenag (kabupaten) Demak.”⁸³

⁸³ Wawancara dengan Enny Rokhmawati, S.Pd. oleh peneliti, (5 Maret 2024) pukul 08.48 WIB

Meskipun Enny termasuk salah satu guru di MA NU Mranggen yang paling awal mendapatkan sosialisasi tentang Kurikulum Merdeka, beliau berpendapat bahwa Kurikulum Merdeka belum siap untuk diterapkan secara kolektif di MA NU Mranggen. Hal ini diungkapkan pada salah satu sesi wawancara dengan peneliti:

“Sebenarnya kalau dibilang madrasah ini menerapkan Kurikulum Merdeka, saya merasa kurikulum itu kurang maksimal diterapkan disini mas. Alasan pertama, mindset anak-anak disini itu sekolah hanya buat genap genap saja. Mereka hanya ingin dapet ijazah lalu kerja. Tidak ada keinginan untuk lanjut kuliah. Sehingga penerapan belajar seperti student-oriented yang mas sebutkan tadi, itu nggak maksimal diterapkan disini...”

Kendala lain yang membuat Enny pesimis tentang penerapan Kurikulum Merdeka di MA NU Mranggen adalah kondisi ekonomi dan latar belakang peserta didik yang mayoritas berasal dari kalangan menengah kebawah. Hal ini kaitannya dengan iuran untuk membeli bahan-bahan proyek dalam program Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Bahkan di beberapa mata pelajaran selain Fiqih, guru terpaksa harus menalangi uang belanja bahan proyek lebih dulu agar P5 dan PPRA bisa dilaksanakan sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.

Observasi pembelajaran Fiqih dilakukan sebanyak 4 kali dalam rentang waktu antara awal bulan Maret hingga akhir April. Hasil observasi yang peneliti lakukan selama kegiatan belajar mengajar di kelas IX MIA 2, pembelajaran fiqih menggunakan metode interaktif. Enny beberapa kali

mengajak para peserta didik untuk berinteraksi dan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang relevan dengan materi pembahasan saat itu. Pembelajaran yang dilakukan oleh Enny cukup terstruktur dan runut sesuai dengan modul ajar, mulai dari pembukaan hingga sesi penutup. Adapun kepribadian yang beliau tunjukkan didepan kelas mengedepankan sikap ceria dan mengayomi. Hasil wawancara dengan Audia dan Rafi (peserta didik kelas XI MIA 2) juga menyimpulkan bahwa Enny merupakan tipe guru favorit di kelas XI MIA 2 karena memiliki sifat keibuan dan jarang marah-marah.

Selama peneliti melakukan observasi di kelas IX MIA 2, Enny mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan baik. Enny tampak cukup menguasai materi pelajaran Fiqh dan mampu menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga suasana kelas selalu kondusif dan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan baik. Evaluasi hasil belajar yang dilakukan Enny dilakukan rutin setiap pergantian bab sehingga peserta didik mampu diukur sejauh mana tingkat pemahaman terhadap isi materi pada bab tersebut. Terkait penggunaan soal ujian berorientasi HOTS, beliau mengungkapkan bahwa penyusunan soal ujian diserahkan sepenuhnya kepada tim penyusun dari MGMP Fiqih tingkat Kabupaten Demak. Soal ujian berorientasi HOTS hanya dikeluarkan ketika penilaian akhir semester gasal dan genap.

3. Sejarah Kebudayaan Islam

Mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di kelas XI MIA 2 diampu oleh H. Muhson Rahmat, S.Pd., beliau merupakan guru lulusan PPG Daljab tahun 2023 di bawah naungan Kementerian Agama. Beliau menceritakan bahwa kurikulum pembelajaran PPG yang beliau ikuti menggunakan sistem belajar berbasis proyek dan materi didalamnya banyak menyinggung tentang Pembelajaran Paradigma Baru kurikulum merdeka.

Selain aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, Muhson juga menjabat sebagai kepala guru Bimbingan Konseling. Sebagai seorang lulusan PPG yang menggunakan kurikulum terbaru, Muhson mendapatkan amanah penugasan dari wakil kepala madrasah sebagai pemateri pada kegiatan *In-House Training* sosialisasi kurikulum merdeka di MA NU Mranggen yang diselenggarakan pada bulan Oktober tahun 2023.

Muhson dalam sesi wawancara dengan peneliti menjelaskan karakteristik pembelajaran mapel-mapel bidang studi PAI pada masa Kurikulum Merdeka secara garis besar ada tiga hal, yaitu penguatan karakter dan pendidikan akhlak, pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar berbasis HOTS. Adapun terkait penyusunan modul ajar sebagai pedoman pembelajaran guru, beliau banyak mengambil referensi dari internet.

“Kalau kamu tanya ke saya apa saja hal yang diintegrasikan dari kurikulum PPG terbaru ke Kurikulum Merdeka, secara garis besar ada tiga hal mas: penguatan karakter dan pendidikan akhlak melalui P5, di madrasah ditambahkan ada yang namanya Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk media belajar berbasis TPACK, dan terakhir evaluasi hasil belajar menggunakan soal soal yang bersifat HOTS.”⁸⁴

Dari ketiga hal yang disebutkan diatas, menurut Muhson yang paling sulit untuk diterapkan di MA NU Mranggen adalah nomor tiga, yaitu evaluasi hasil belajar menggunakan pertanyaan yang sifatnya HOTS. Hal ini dikarenakan rendahnya minat dan motivasi belajar para peserta didik di MA NU Mranggen. Bahkan untuk mengakomodir alokasi JP kokurikuler proyek penguatan profil pelajar pancasila, Muhson harus menggunakan model proyek kolaborasi dengan guru mata pelajaran Aqidah Akhlak untuk meminimalisir ketidakikutsertaan peserta didik.

Observasi pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dilakukan sebanyak empat kali dalam rentang waktu antara bulan Maret hingga bulan April. Hasil observasi yang peneliti lakukan selama kegiatan belajar mengajar di kelas IX MIA 2, pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam menggunakan pendekatan model *student-oriented*. Muhson juga beberapa kali aktif menggunakan media pembelajaran audio visual untuk menampilkan tayangan film yang berkaitan dengan kisah para sahabat. Setelah tayangan film selesai, peserta didik diberikan materi tambahan dari Muhson dan

⁸⁴ Wawancara dengan H. Muhson Rahmat, S.Pd. oleh peneliti, (20 Maret 2024) pukul 10.11 WIB

selanjutnya merangkum materi belajar yang dibahas pada pertemuan hari itu. Pembelajaran yang dilakukan oleh Muhson tidak selalu sesuai dengan modul ajar, dikarenakan beliau beberapa kali terlihat mengakhirkan pembelajaran lebih cepat jika dirasa suasana kelas sudah mulai tidak kondusif.

Sikap kepribadian yang beliau tunjukkan didepan kelas adalah mengedepankan sikap sabar dan santai. Hasil wawancara dengan Rafi dan Audia juga menyimpulkan bahwa Muhson merupakan tipe guru favorit di kelas XI MIA 2 karena memiliki pembawaan yang sabar dan mengedepankan keteladanan dalam mendidik peserta didiknya.



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pendidikan Profesi Guru diselenggarakan untuk mengembangkan kompetensi dasar guru agar sesuai dengan standar nasional. Untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan guru bersertifikat, pemerintah membagi Pendidikan Profesi Guru kedalam dua jenis, yaitu Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dan Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Kurikulum yang digunakan dalam PPG Kemendikbudristek dan PPG Kemenag terintegrasi dengan Kurikulum Merdeka jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Integrasi kurikulum diwujudkan dengan adanya orientasi paradigma pembelajaran baru didalam materi belajar Pendidikan Profesi Guru. Diharapkan adanya orientasi tersebut dapat membuat guru memahami struktur kurikulum merdeka sesuai dengan panduan.
2. Pembelajaran PAI di MA NU Mranggen masih menggunakan Kurikulum 2013 sebelum adanya implementasi kebijakan Pendidikan Profesi Guru. Pembelajaran PAI Kurikulum 2013 memiliki karakteristik penekanan pada aspek kognitif peserta didik. Peningkatan nalar kritis peserta didik dilakukan pendekatan saintifik yang terbagi kedalam lima fase, yaitu mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Adapun penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi belum dapat diterapkan secara maksimal mengingat keterbatasan

kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berbasis TPACK.

3. Para guru yang telah dinyatakan lulus dari program PPG diyakini mampu membawa perubahan dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran yang sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Observasi penelitian di MA NU Mranggen dilakukan untuk melihat implikasi yang dihasilkan dari kebijakan PPG terhadap karakteristik pembelajaran PAI Kurikulum Merdeka. Hasilnya ditemukan bahwa PPG memberikan implikasi berupa peningkatan kompetensi guru dalam hal pengelolaan pembelajaran (pedagogik), penguasaan keilmuan (profesional), sikap atau kepribadian, interaksi sosial, dan kepemimpinan.

B. SARAN

Penelitian tentang analisis kebijakan bersifat dinamis mengikuti perkembangan kondisi realita sosial yang ada di lapangan. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian analisis kebijakan yang dapat terus dikembangkan berdasarkan temuan-temuan baru dari implementasi sebuah kebijakan yang mengatur tentang Pendidikan Profesi Guru. Saran untuk penelitian selanjutnya yang mengacu pada penelitian ini adalah mengembangkan kajian analisis mengenai implikasi kebijakan PPG dengan menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur angka ketercapaian standar kompetensi guru yang telah dinyatakan lulus dari Pendidikan Profesi Guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis* 5, no. 2 (2020).
- Anam, Khoirul. "Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 86–94. <https://www.slametmulyani.com/2020/05/hari-pendidikan-nasional-belajar-tanpa.html>.
- Aos Nuari, Muhammad. "Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat." Universitas Indonesia, 2012.
- Arifa, Fieka Nurul, and Ujianto Singgih Prayitno. "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional Di Indonesia." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v10i1.1229>.
- Arikunto, Suharsimi, Supardi, and Suhardjono. *Penelitian Tindakan Kelas*. Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Psikologi Edisi II*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Bachri, Bachtiar S. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10 (2010).
- Daradjat, Zakiah. *Metodologi Pengajaran Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Daryanto, and Syaiful Karim. *Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2017.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*. Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2005.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2012.

- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Edited by Pipih Latifah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fauzi, Achmad. “Implementasi Kurikulum Merdeka Di Sekolah Penggerak.” *Pahlawan: Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya* 18, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.57216/pah.v18i2.480>.
- Firmansyah, Haris. “Proses Perubahan Kurikulum K-13 Menjadi Kurikulum Merdeka.” *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i2.4910>.
- Firmansyah, Imam. “Pendidikan Agama Islam : Pengertian, Tujuan, Dasar, Dan Fungsi.” *Ta’lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 17, no. 2 (2019): 79–92.
- Hafsah. “Karakteristik Pembelajaran PAI Dalam Pendidikan Formal.” *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021): 221–37.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Hatija, Muna, Lubis Lubis, and Ratna Rahim. “Teori-Teori Belajar Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran PAI.” *Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan*, 2023. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:267272331>.
- Iskandar, Rozi, and Farida F. “Implementasi Model ASSURE Untuk Mengembangkan Desain Pembelajaran Di Sekolah Dasar.” *Jurnal Basicedu* 4, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.468>.
- “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *Buku Pendidikan Profesi Guru Prajabatan*. 1st ed. Jakarta: Direktorat PPG Kemendikbudristek RI, 2023.
- . *Buku Pintar Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan*. 1st ed. Jakarta: Direktorat PPG Kemendikbudristek RI, 2023.
- . *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Jakarta: JDIH Kemendikbudristek RI, 2024.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah*. Jakarta: JDIH Kemendikbudristek RI, 2006.

- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru*. Jakarta: JDIH Kemenristekdikti RI, 2017.
- Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Biro Hukum dan Politik, Kementerian Sekretaris Negara, 2007.
- Khairunnisa, Waluyo Erry Wahyudi, Ahmad Fatoni, and Saidy. "Strategi Guru PAI: Problematika Dan Solusi Peningkatan Prestasi Belajar Peserta Didik." *Tafahus: Jurnal Pengkajian Islam* 2, no. 2 (December 2022): 133–49.
- Langgulong, Hasan. *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2003.
- Mahiddin, La. *Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia (Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Serta Implikasinya Terhadap Kemajuan Pendidikan Agama Islam Di Indonesia)*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 1, 2021.
- Maryani, Elly. "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Cara Untuk Menjadikan Guru Menjadi Profesional." *Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* 2, no. 4 (2022).
- Moleong, Lexy J., and Tjun Surjaman. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remadja Karya, 1989.
- Naim, Muhammad, Abd Rajab, and Muhammad Alip. "Esensi Metode Pembelajaran Perspektif Pendidikan Islam (Essence of Islamic Education Perspective Learning Method)." *ISTIQRA': Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2020).
- Ningrum, Epon. "Membangun Sinergi Pendidikan Akademik (S1) Dan Pendidikan Profesi Guru (PPG)." *Jurnal Geografi Gea* 12, no. 2 (March 28, 2016). <https://doi.org/10.17509/gea.v12i2.1783>.
- Prof. Dr. A.M. Yusuf, M.Pd. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Rachman, Maryam Aulia. "Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Madrasah Aliyah Se-Kota Ende (Studi Evaluasi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende Tahun 2019-2020)." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Sudjana, Nana. *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2018.

- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya*. 5th ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Sulaiman. *Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI): Kajian Teori Dan Aplikasi Pembelajaran PAI*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2017.
- Suryadi, Ace, and Henry Alexis Rudolf Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1933.
- Susanto, Dedi, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>.
- Tjahjono, A B, M A Sholeh, A Muflihini, K Anwar, H Sholihah, T Makhshun, and S Hariyadi. *Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Budaya Akademik Islami (BUDAI)*. CV. Zenius Publisher, 2023. https://books.google.co.id/books?id=MN_rEAAAQBAJ.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2023.
- William N. Dunn. *Analisis Kebijaksanaan Publik: Kerangka Analisis Dan Prosedur Perumusan Masalah*. Edited by Muhadjir Darwin. Indonesia Version. Vol. 9. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001.
- . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Terjemah Bahasa Indonesia)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
- Winarno, Budi, and Indra Ismawan. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.
- Zainal Abidin, Said. *Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.
- Zulfitri, Hanifa, Ndyia Putri Setiawati, and Ismaini. "Pendidikan Profesi Guru (PPG) Sebagai Upaya Meningkatkan Profesionalisme Guru." *LINGUA, Jurnal Bahasa & Sastra* 19, no. 2 (2019): 130–36.